



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



RENCANA AKSI NASIONAL PERTANIAN KELUARGA INDONESIA 2020-2024





PERTANIAN KELUARGA



KATA PENGANTAR

Pasca ditetapkan tahun 2019-2028 sebagai Dekade PBB untuk Pertanian Keluarga (*United Nation Decade on Family Farming*), Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap penguatan pertanian keluarga dunia. Berbagai inisiatif, kebijakan dan program telah dan akan terus dilakukan dalam mendukung penguatan pertanian keluarga sebagai transformasi sistem pangan dan perdesaan yang inklusif.

Family farming dalam konteks global saat ini telah dipandang sebagai tulang punggung pembangunan dan pencapaian ketahanan pangan yang berkontribusi penting dalam pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya target SDG-1 yaitu pengentasan kemiskinan dan tujuan SDG-2 yaitu mengakhiri kelaparan melalui ketahanan pangan, perbaikan nutrisi dan sistem pertanian berkelanjutan.

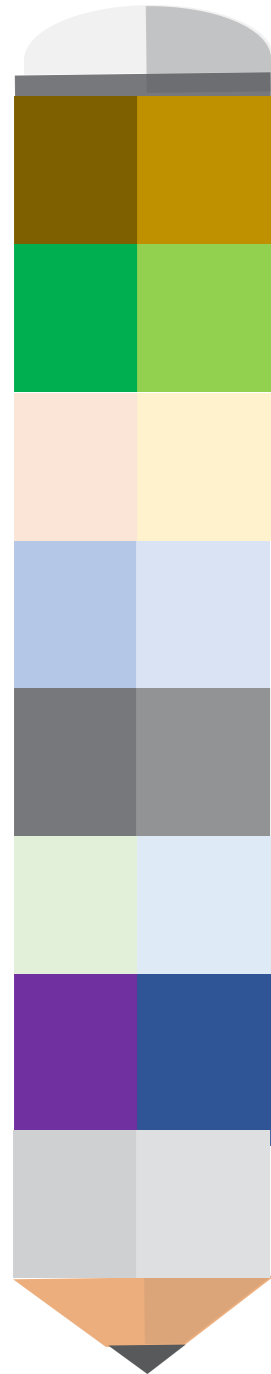
Hal tersebut sejalan dengan amanat UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemenuhan kecukupan pangan bagi setiap warga negara dalam jumlah yang cukup, berkualitas, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pemberdayaan keluarga petani dapat meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga. Rencana Aksi Nasional Pertanian Keluarga Tahun 2020-2024 (RAN-PK 2020-2024) disusun untuk mengembangkan pertanian keluarga secara masif dan berkelanjutan. RAN-PK ini menjadi acuan lintas sektor dan untuk provinsi maupun kabupaten/kota disusun Rencana Aksi Daerah Pertanian Keluarga (RAD-PK) sesuai dengan potensi dan karakteristik pertanian masing-masing wilayah.

Kepala Badan Ketahanan Pangan

Dr. Ir. Agung Hendriadi., M.Eng

DAFTAR ISI



Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

Pendahuluan

1

Kerangka Pertanian Keluarga

4

Tujuh Pilar Pertanian Keluarga

8

Tahapan Implementasi

10

Target Pengembangan Pertanian Keluarga

12

Koordinasi Implementasi

13

Penutup

15

Lampiran

ii

PENDAHULUAN



Latar Belakang

Hasil studi FAO menyebutkan bahwa lebih dari 90% dari 570 juta usaha tani di seluruh dunia dikelola oleh individu atau keluarga, dimana sebagian besar bergantung pada tenaga kerja keluarga, baik laki-laki maupun perempuan. Pertanian keluarga berkontribusi terhadap produksi pangan dunia sebesar 80%. Pertanian keluarga juga menguasai sekitar 70-80% lahan pertanian dunia dan menghasilkan 80% pangan dunia dari sisi nilai produksi yang dihasilkan. Sidang Umum PBB sesi ke-72 mendeklarasikan the UN Decade of Family Farming (UNDIFF) 2019-2028 sebagai acuan negara-negara untuk mengembangkan kebijakan dan investasi dalam upaya mendukung pertanian keluarga

Indonesia terus berperan di tingkat global dalam mendukung Pertanian Keluarga. Indonesia telah menyelenggarakan *Regional Conference on Strengthening Southeast Asia's Food Security, Nutrition, and Farmers' Welfare through UN Decade of Family Farming* di Jakarta pada tanggal 4-5 April 2019. Konferensi ini dihadiri oleh peserta yang berasal dari kementerian dan lembaga terkait, perwakilan dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur, serta perwakilan dari FAO, IFAD, dan WFP. Selanjutnya, Indonesia diundang sebagai salah satu narasumber untuk menyampaikan pengalamannya dalam penguatan pertanian keluarga pada pertemuan *Committee on World Food Security (CFS) ke-46* tanggal 14-18 Oktober 2019 di Roma, Italia.

Bagi Indonesia, menempatkan pertanian keluarga sebagai fokus intervensi kebijakan dan program sangat penting dilakukan karena menurut BPS (2018) terdapat 27,6 juta Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) yang menjadi penyedia pangan bagi sekitar 265 juta penduduk Indonesia. Penguatan program pertanian keluarga diyakini dapat meningkatkan penyediaan pangan, perbaikan gizi sekaligus peningkatan kesejahteraan keluarga. Hal ini sejalan dengan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Pertanian keluarga telah diakui secara global sebagai kunci dalam mewujudkan SDGs, khususnya dalam menjamin ketahanan pangan global, memberantas kemiskinan, mengakhiri kelaparan, melestarikan keanekaragaman hayati, mencapai lingkungan yang lestari dan membantu mengatasi migrasi. Pertanian keluarga akan mampu sebagai solusi vital menghadapi masalah kelaparan apabila ada dukungan sektor publik. Peran sektor publik dibutuhkan untuk menciptakan kebijakan dan lingkungan yang sesuai. Gerakan

seperti ini harus dipimpin oleh pemerintah dan melibatkan partisipasi berbagai pihak dari lembaga-lembaga internasional, regional, masyarakat sipil, swasta, hingga riset. Semua *stakeholder* diharapkan mampu berinovasi dalam mengambil bagian masing-masing. Inovasi yang dibutuhkan harus mampu menjawab tantangan nyata sekarang dan di waktu yang akan datang. Pertanian keluarga sangat beragam dan kehidupannya kompleks sehingga diperlukan satu kebijakan yang memadai karena pertanian keluarga di setiap negara dan wilayah membutuhkan solusi masalah sendiri sesuai kebutuhan khususnya dalam konteks lokal.

Tujuan Penyusunan Dokumen RAN Pertanian Keluarga

Tujuan penyusunan dokumen RAN Pertanian Keluarga adalah sebagai acuan bagi para pihak terkait untuk merumuskan program/kegiatan prioritas dalam rangka penguatan pertanian keluarga untuk periode 2020-2024. Pemerintah Daerah menindaklanjuti dokumen ini dengan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pertanian Keluarga.

KERANGKA PERTANIAN KELUARGA



Pertanian Keluarga adalah kegiatan pertanian, perikanan dan akuakultur, kehutanan serta peternakan berbasis sumber daya lokal yang dikelola secara bersama oleh anggota keluarga pada lahan yang dimiliki ataupun disewa/dipinjam untuk memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan ekonomi keluarga.

Pertanian keluarga memberikan beberapa dampak positif terhadap pembangunan pertanian dunia. Dampak positif tersebut antara lain (1) 70% produksi pangan dunia dihasilkan oleh pertanian keluarga; (2) 40% rumah tangga dunia bergantung dari usaha pertanian, sehingga pertanian keluarga telah menciptakan kesejahteraan dunia; (3) pertanian keluarga berhasil mengurangi kemiskinan. Data dari World Bank menyatakan bahwa pertumbuhan GDP pertanian mampu mengurangi kemiskinan dua kali lebih banyak dibandingkan dari sektor lain; dan (4) pertanian keluarga menjaga keragaman biodiversitas dan lingkungan. Dalam usaha budidaya, petani melakukan penanaman beragam jenis tanaman dalam satu hamparan yang dapat melestarikan keragaman biodiversitas (sumber daya genetik) dan juga memelihara beberapa jenis ternak dalam waktu bersamaan.

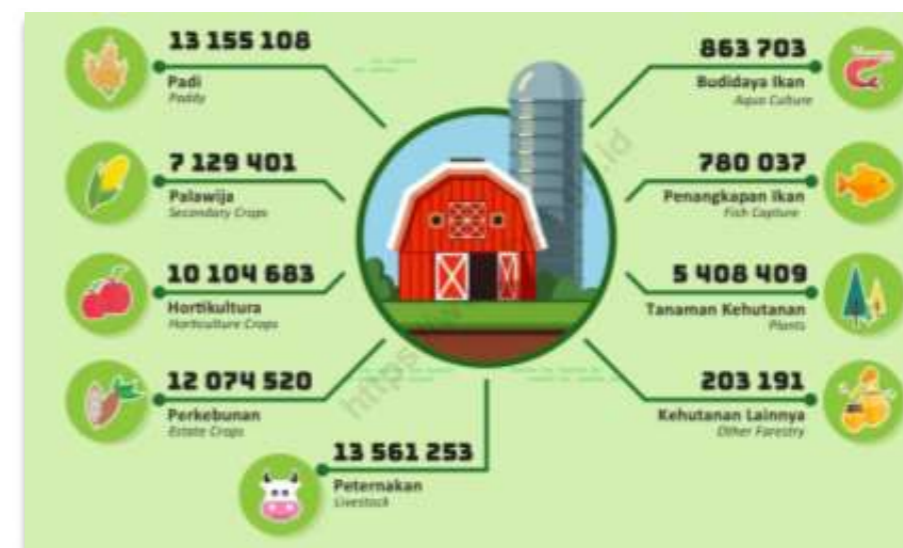
Keberadaan usaha pertanian dengan pola seperti ini mendominasi hampir seluruh usaha pertanian di Indonesia, beserta dengan keluarga-keluarga petani sebagai pengelolanya. Dalam RAN Pertanian Keluarga, subyek sasaran dari program adalah Keluarga Petani baik yang menguasai lahan maupun menyewa/meminjam lahan. Bentuk aktivitas dalam pertanian keluarga meliputi kegiatan pertanian, perikanan dan akuakultur, kehutanan serta peternakan. Rumah tangga dikategorikan sebagai rumah tangga usaha pertanian apabila keluarga petani tersebut melakukan minimal salah satu kegiatan berikut:

- a. Mengusahakan tanaman padi dan atau palawija, hortikultura, perkebunan
- b. Mengusahakan tanaman kehutanan
- c. Mengusahakan ternak/unggas
- d. Membudidayakan ikan
- e. Melakukan penangkapan ikan dan usaha pergarman

Pertanian keluarga mengalami perubahan terutama dalam penggunaan tenaga kerja, meningkatnya ketergantungan petani terhadap input-input luar dan semakin kecilnya luasan lahan yang dikuasai oleh keluarga petani. Berdasarkan data hasil Survey Pertanian Antar Sensus (SUTAS, 2018) jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) sebanyak 27.682.117 rumah tangga dan rata-rata luas lahan yang dikuasai oleh mereka adalah seluas 0,78 hektar, bahkan sebanyak 15.890.427 RTUP menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar. Sepanjang usaha pertanian pengelolaanya dilakukan oleh keluarga dan atau sebagian besar tenaga kerja berasal dari keluarga yang bersangkutan dan tanpa memandang luas lahan yang dikuasainya, maka sistem pertanian tersebut disebut pertanian keluarga.

Di Indonesia, pertanian keluarga juga mendominasi sektor pertanian dan memberikan kontribusi terhadap Produk domestik bruto (PDB). Sejak tahun 2010 hingga 2017, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB terus mengalami kenaikan (BPS 2018). Rata-rata sektor pertanian menyumbang 13,4% PDB Indonesia (BPS 2018) dan menyerap tenaga kerja sekitar 30,46% (BPS 2018).

Menurut data BPS (2018), petani Indonesia berjumlah 33.487.806 orang yang terdiri dari 25.436.478 laki-laki dan 8.051.328 perempuan. Berdasarkan jenis usaha/sub sektor yang diusahakan oleh RTUP, petani yang mengusahakan sub sektor peternakan menempati jumlah yang paling besar yaitu 13,56 juta, diikuti sub sektor padi 13,15 juta, perkebunan 12,07 juta, dan sub sektor hortikultura 10,10 juta, palawija 7,13 juta, kehutanan 5,41 juta, budidaya ikan 0,86 juta, penangkapan ikan 0,78 juta dan kehutanan lainnya 0,20 juta. Sub sektor peternakan dan tanaman padi mendominasi usaha pertanian keluarga yang menyebar di seluruh wilayah di Indonesia (Gambar 2.1)



Gambar 2.1 Profil Rumah Tangga Usaha Pertanian (Sutas-BPS, 2018)

Tujuan pelaksanaan RAN Pertanian Keluarga adalah: (1) meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan pangan keluarga yang sesuai dengan kebutuhan gizi seimbang, dan (2) meningkatkan pendapatan keluarga. Dampak yang diharapkan adalah sesuai dengan target SDGs 1 “Pengentasan kemiskinan” dan SDGs 2 “Mengakhiri kelaparan”. Fokus lokasi pelaksanaan di wilayah rentan rawan pangan (Gambar 2.2).



Gambar 2.2 Kerangka Pertanian Keluarga

7

PILAR PERTANIAN KELUARGA



Pertanian keluarga dilaksanakan dengan menggunakan 7 pilar pertanian keluarga, yang meliputi:

- a. Pilar 1: Mengembangkan **kebijakan** yang memungkinkan untuk memperkuat pertanian keluarga.
- b. Pilar 2: Mendukung **kaum muda** dan menjamin keberlanjutan generasi pertanian keluarga.
- c. Pilar 3: Mendorong **kesetaraan gender** dalam pertanian keluarga dan peran perempuan di perdesaan.
- d. Pilar 4: Memperkuat organisasi dan kapasitas keluarga petani yang mewakili kepentingan petani, **menghasilkan pengetahuan** dan menyediakan layanan inklusif di perdesaan.
- e. Pilar 5: Mendorong keberlanjutan pertanian keluarga untuk **sistem pangan yang lebih tahan terhadap perubahan iklim**.
- f. Pilar 6: Meningkatkan **sosial-ekonomi, ketahanan dan kesejahteraan** petani keluarga, rumah tangga perdesaan dan masyarakat.
- g. Pilar 7: Memperkuat multidimensionalitas pertanian keluarga untuk mempromosikan inovasi sosial yang berkontribusi pada pengembangan wilayah dan **sistem pangan yang melindungi keanekaragaman hayati, lingkungan dan budaya**.

TAHAPAN IMPLEMENTASI



Dokumen RAN-PK ini memuat kerangka pertanian keluarga, tujuan dan target yang akan dicapai, lokasi pelaksanaan, dan dampak yang dihasilkan setelah program selesai. RAN-PK disusun untuk memandu implementasi secara nasional, menyesuaikan kebutuhan dan prioritas oleh berbagai pemangku kepentingan sehingga menjadi aksi, kebijakan, dan proses perubahan untuk kepentingan keluarga petani dan peningkatan kesejahteraan keluarga petani di masa depan. RAN-PK pada intinya merupakan komitmen pemerintah dalam mendukung pertanian keluarga.

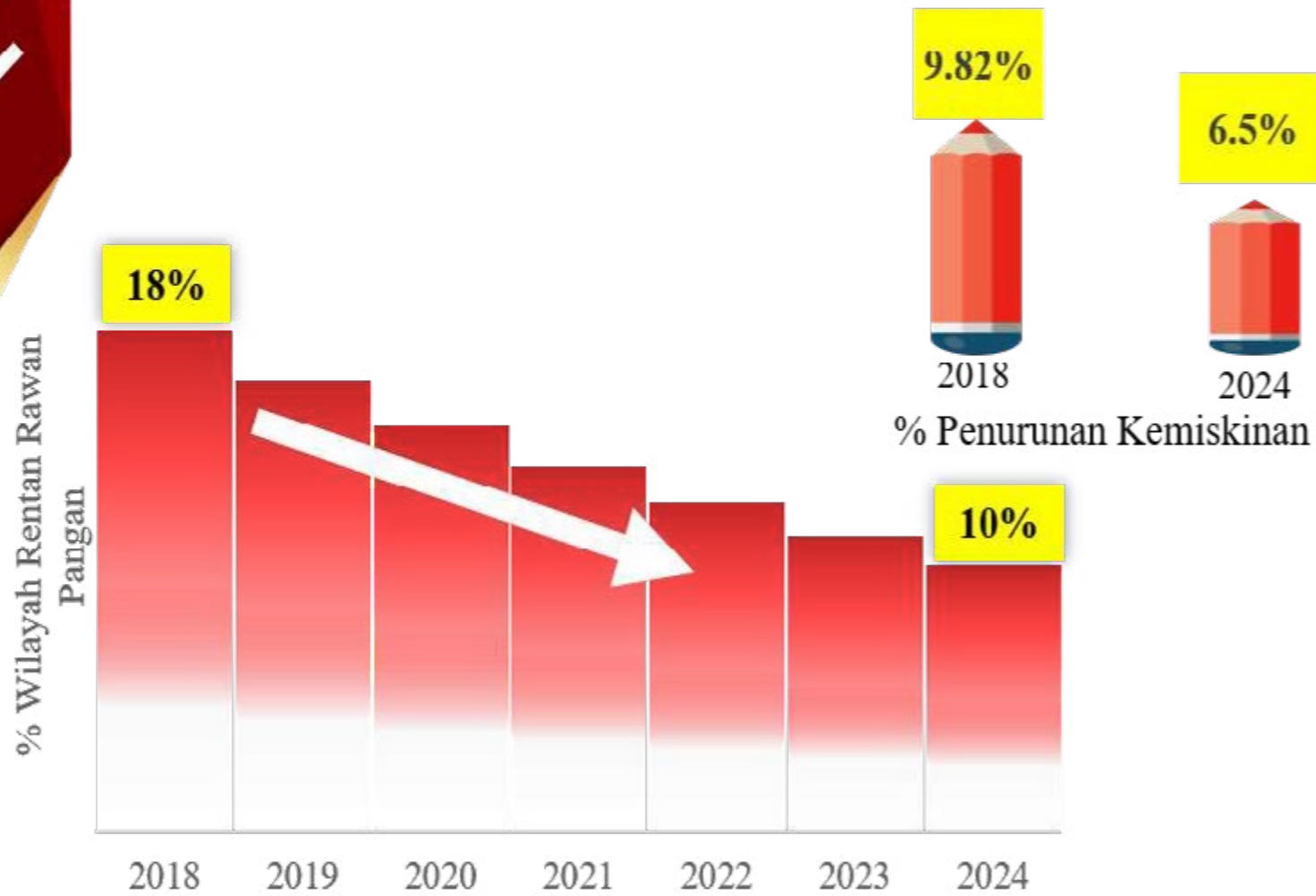
Rencana aksi ini disusun dari bahan-bahan pokok berupa kebijakan nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJP dan RPJM) yang disusun Bapenas dipadukan dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) berbagai kementerian. Selain melalui elaborasi dokumen, bahan ini juga disusun dari serangkaian diskusi dan workshop di tingkat nasional yang melibatkan berbagai pihak, baik dari kalangan pemerintah maupun NGO organisasi petani.

RAN Pertanian Keluarga dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

- Identifikasi wilayah rentan rawan pangan dan keluarga petani sasaran
- Penyusunan kebijakan pusat dan daerah
- Keterlibatan pemuda dan kesetaraan gender
- Penyediaan pendidikan vokasi, pelatihan dan pendampingan
- Penguatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim
- Penguatan akses keluarga petani terhadap permodalan, sarana produksi dan asuransi usaha tani
- Pengembangan budidaya pangan yang beragam, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian untuk keberlanjutan usaha tani dan menjaga biodiversitas



TARGET PENGEMBANGAN PERTANIAN KELUARGA



Sesuai dengan tujuan Pertanian Keluarga, terdapat 2 target yang akan dicapai Pertanian Keluarga pada tahun 2024, yaitu pengentasan wilayah rentan rawan pangan dan penurunan kemiskinan. Pengentasan wilayah rentan rawan pangan memiliki target untuk menurunkan persentase wilayah rentan rawan pangan dari 18% pada tahun 2018 menjadi 10% pada tahun 2024. Target penurunan kemiskinan adalah dari 9,82% pada tahun 2018 menjadi 6,5% pada tahun 2024.

KOORDINASI IMPLEMENTASI



Implementasi kegiatan dalam Rencana Aksi Nasional Pertanian Keluarga merupakan tanggung jawab bersama lintas instansi dan organisasi non-pemerintah. Tanggung jawab, peran dan fungsi tetap melekat pada masing-masing instansi atau sektor sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Mekanisme koordinasi dalam implementasi RAN Pertanian Keluarga dilakukan oleh penanggung jawab rencana aksi.

Penanggung Jawab Rencana Aksi

Pertanian Keluarga dilaksanakan dengan prinsip multistakeholder yang melibatkan semua lintas sektor terkait, antara lain Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, Kemen PPA, Bappenas, Kementan, KLHK, KKP, Kemenkop, Kemendag, Kemenkumham, dan organisasi non-pemerintah (KNPK). Dalam hal ini, Kementerian Pertanian bertindak sebagai koordinator dalam pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Pertanian Keluarga.

Pendanaan

Pendanaan dalam pelaksanaan Pertanian keluarga berasal dari APBN yang melekat pada instansi masing – masing dan sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan perundangan dan bersifat tidak mengikat.

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilaksanakan oleh semua pelaksana dan selanjutnya dibuat laporan secara keseluruhan kepada koordinator minimal satu tahun sekali. Evaluasi dilakukan setiap tahun untuk menilai capaian dan tantangan yang dihadapi agar dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Gerakan dekade pertanian keluarga pada periode 5 tahun ke depan (2020-2024), menjadi semangat baru untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan pangan keluarga yang sesuai dengan kebutuhan gizi seimbang, serta meningkatkan pendapatan keluarga.

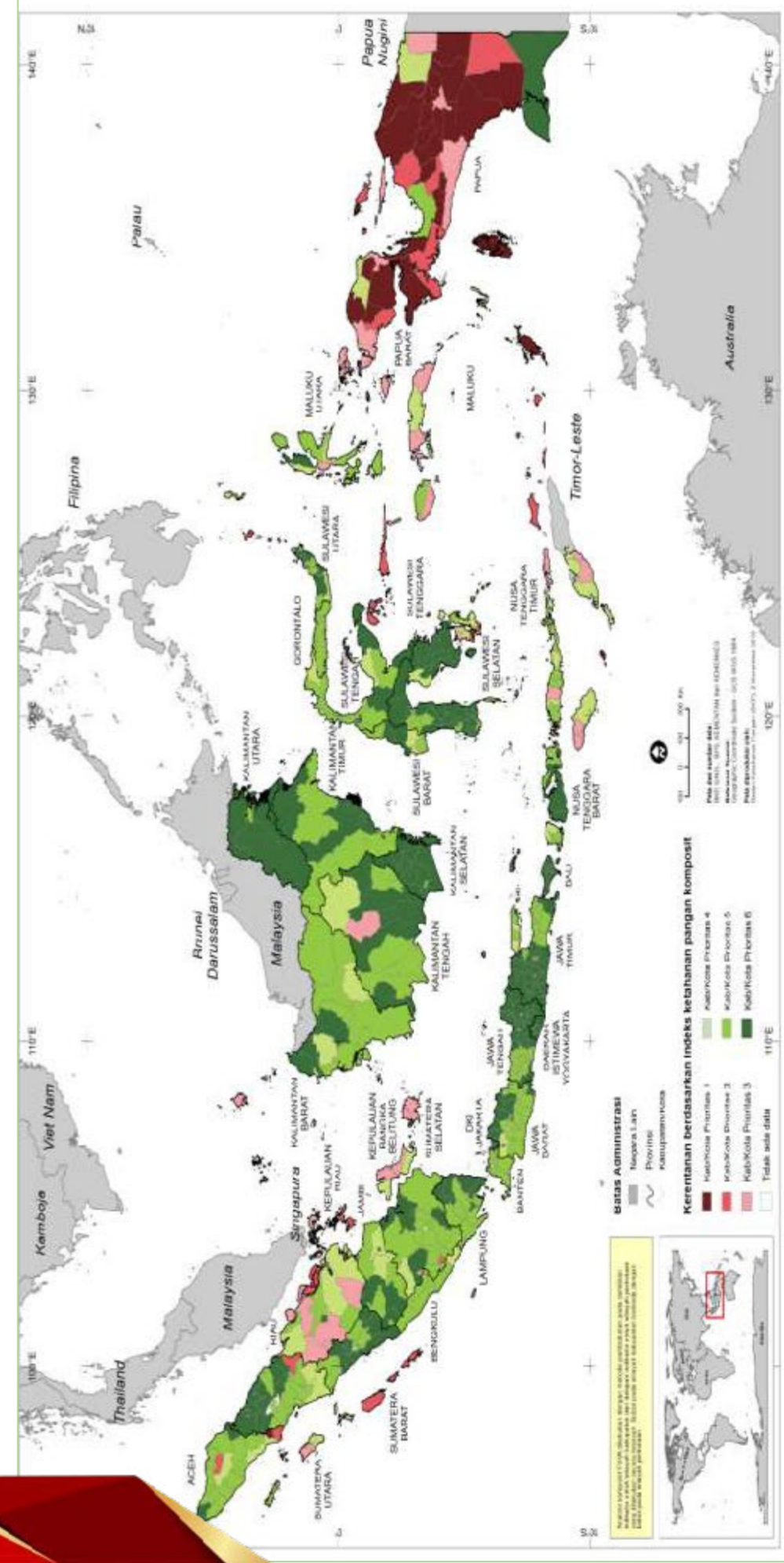
Dokumen RAN-PK ini disusun bersamaan dengan proses penyusunan dokumen pembangunan nasional, seperti RPJM dan Renstra pada berbagai kementerian terkait. Harmonisasi ini diperlukan agar dokumen ini dapat diimplementasikan secara optimal, dan dapat dilakukan perubahan sesuai perubahan kebijakan pembangunan nasional. Selanjutnya, dokumen RAN-PK ini merupakan acuan dalam menyusun Rencana Aksi Daerah Pertanian Keluarga (RAD-PK).

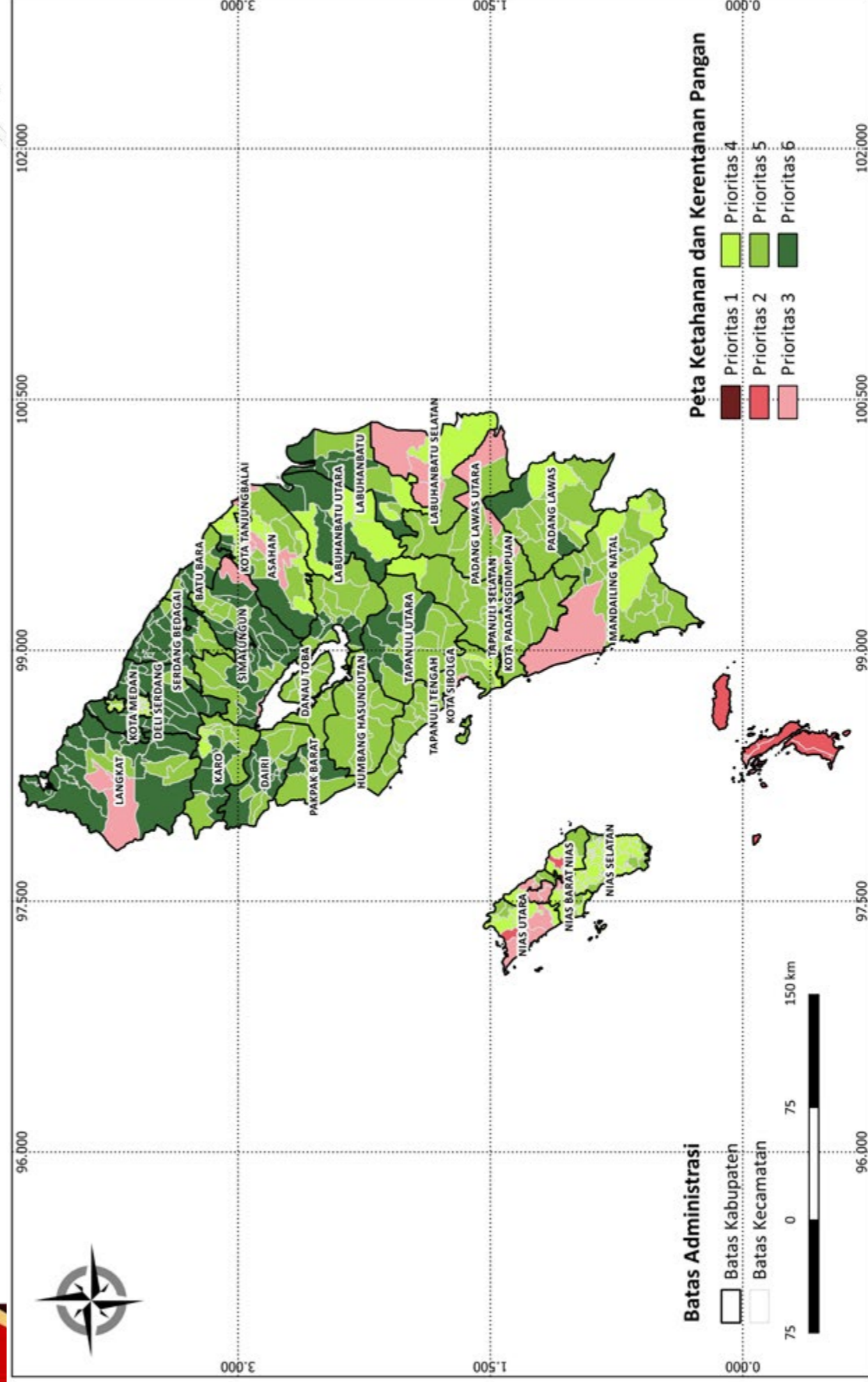
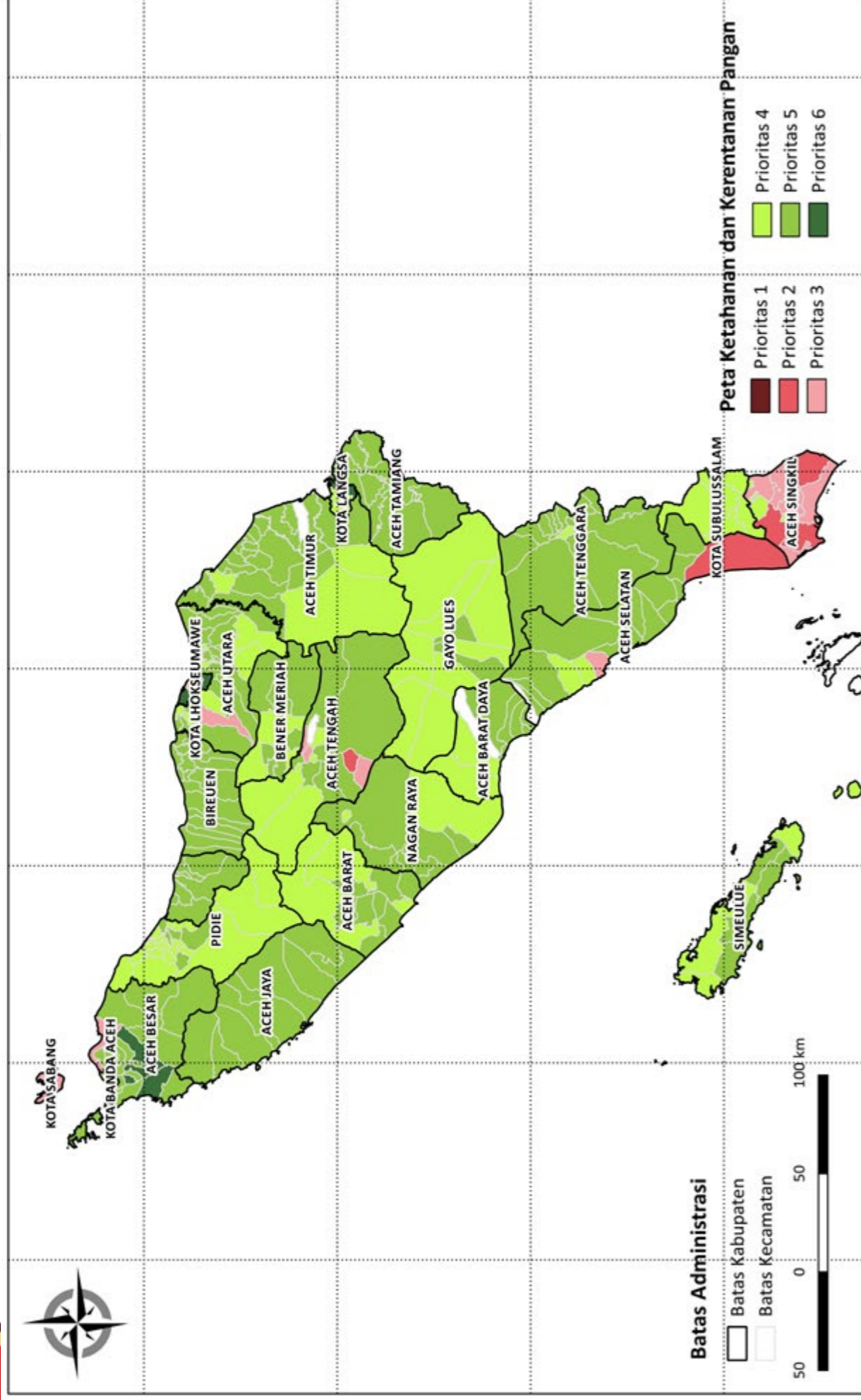


PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN (*FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS/FSVA*) NASIONAL DAN PROVINSI 2018

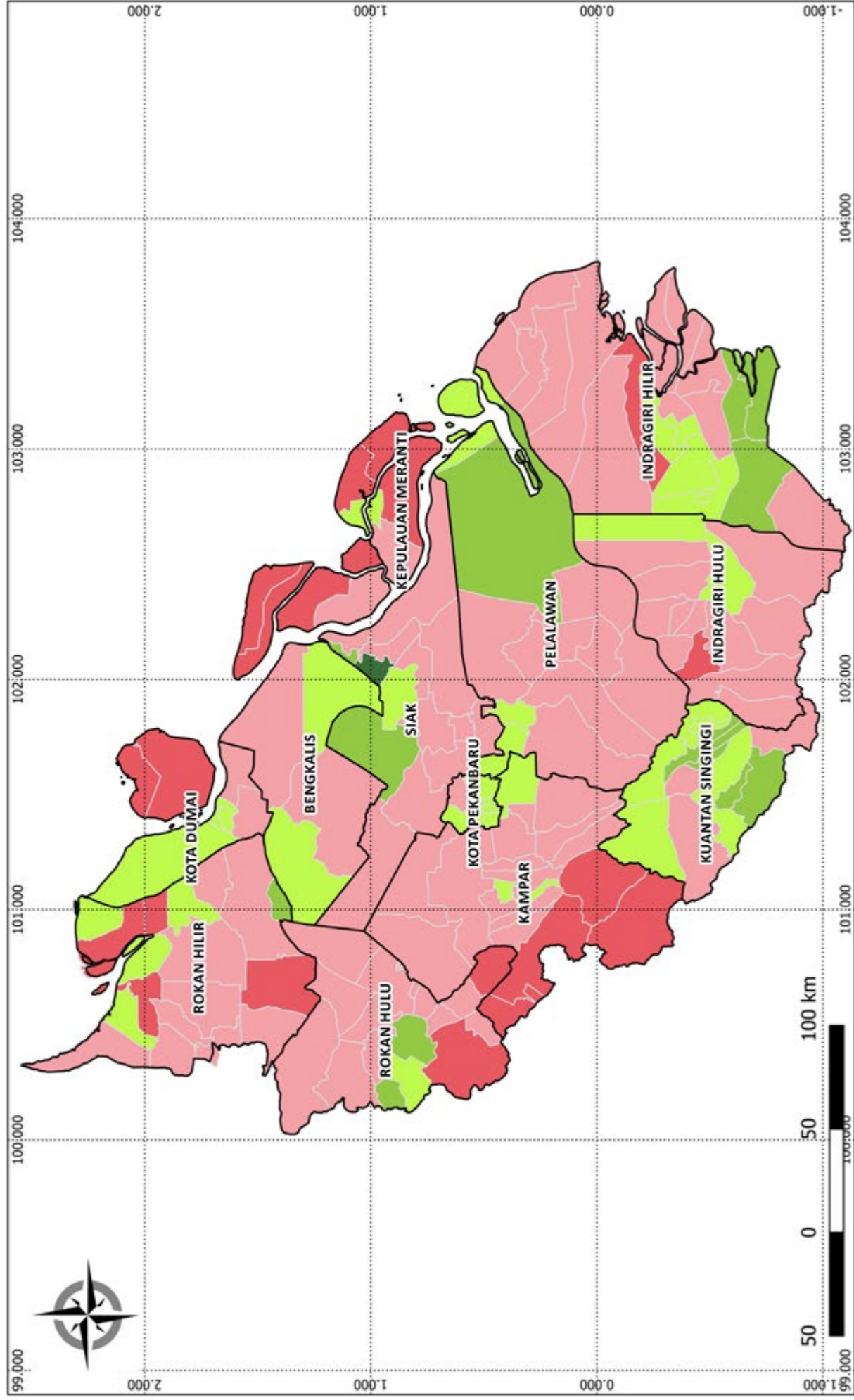


NASIONAL

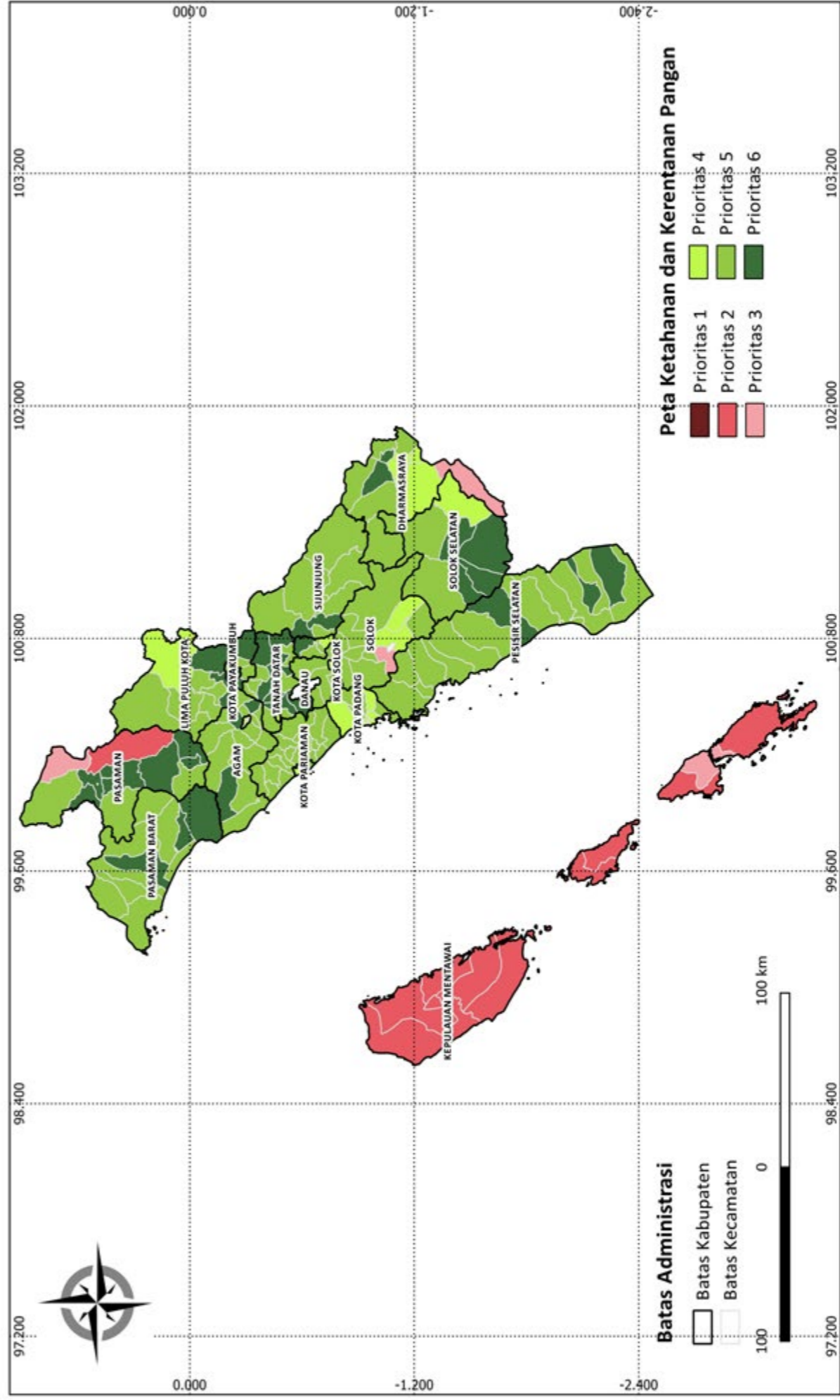




PROVINSI RIAU



PROVINSI SUMATERA BARAT



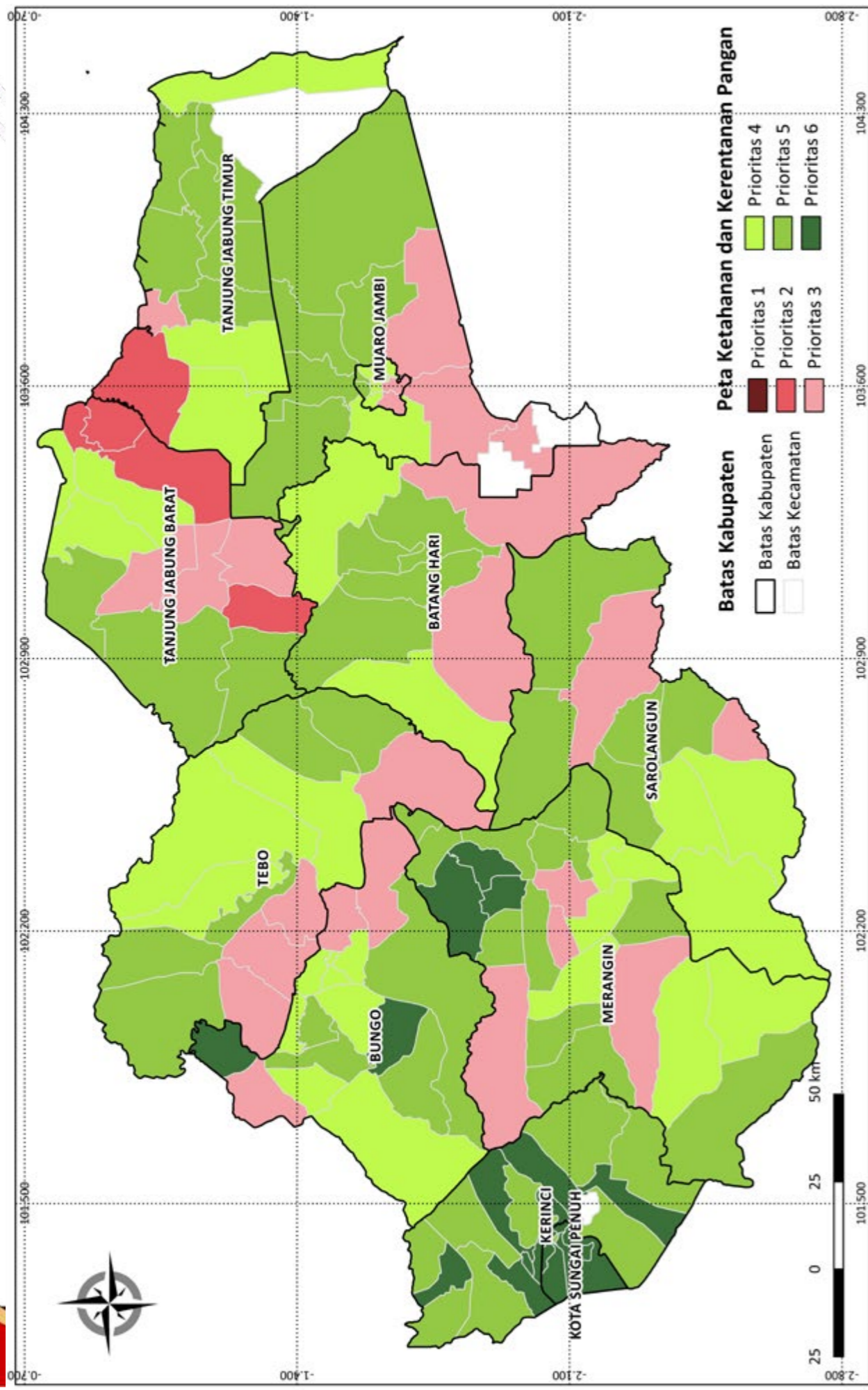
Batas Administrasi

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

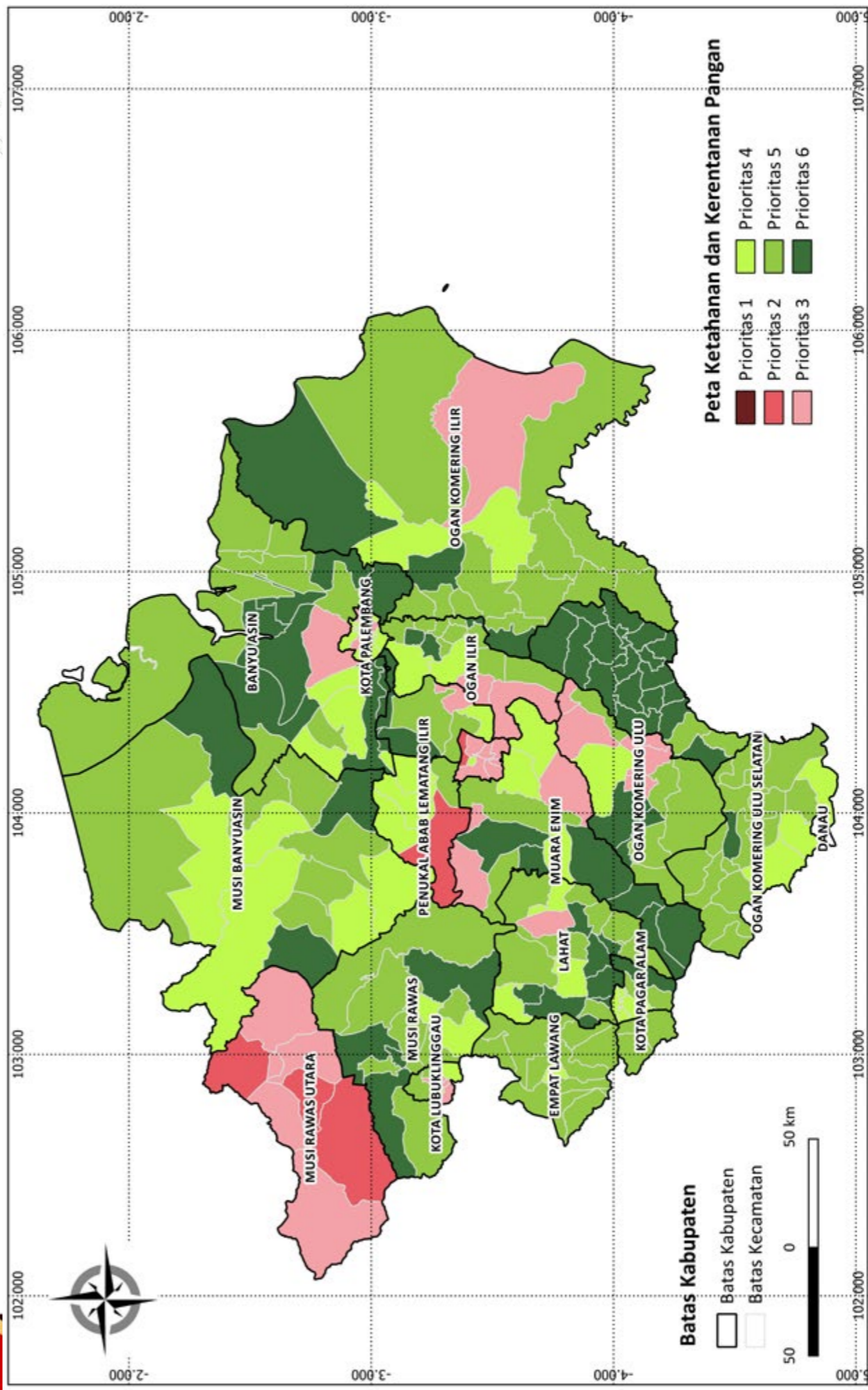
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

- Prioritas 1
- Prioritas 2
- Prioritas 3
- Prioritas 4
- Prioritas 5
- Prioritas 6

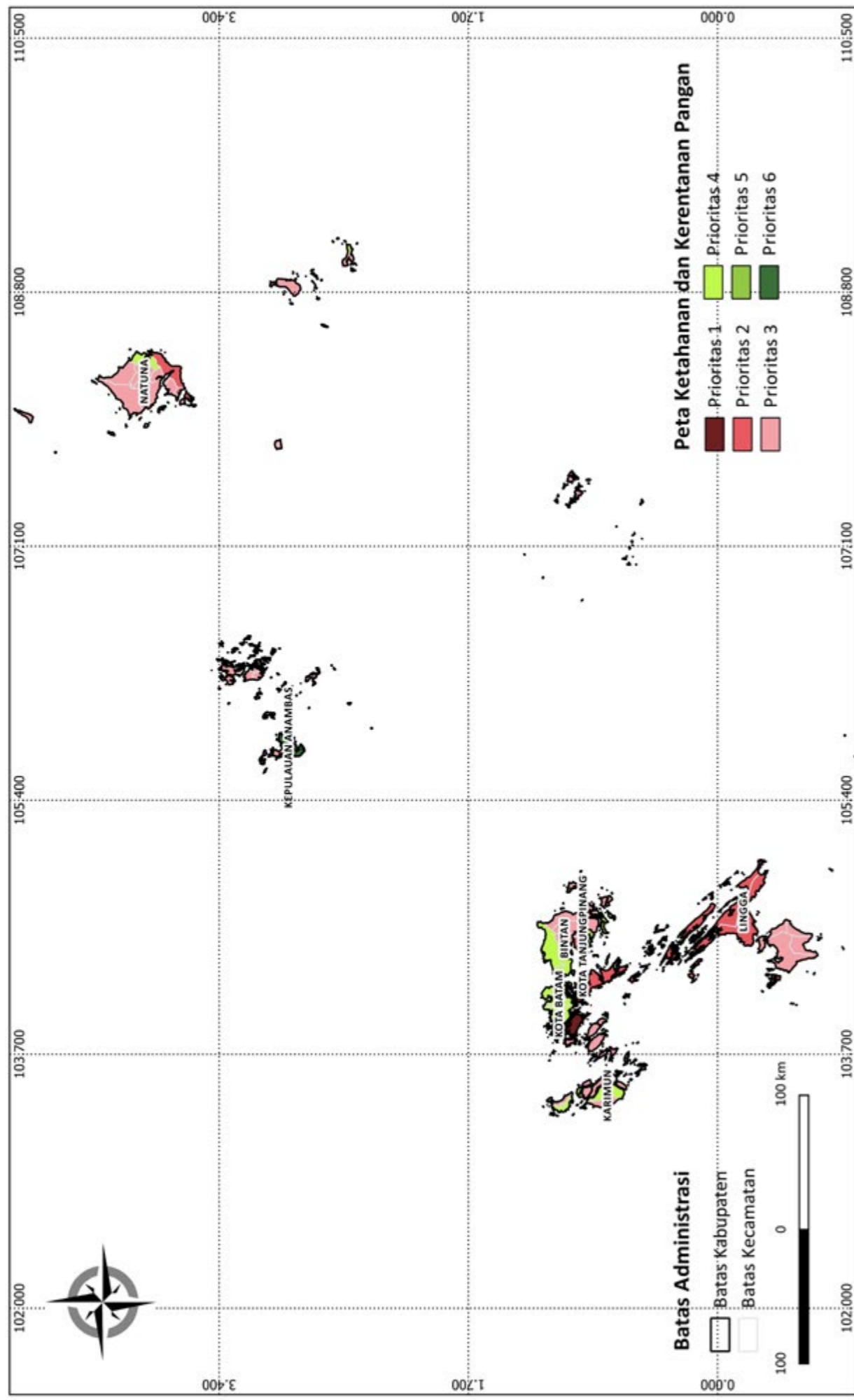
PROVINSI JAMBI



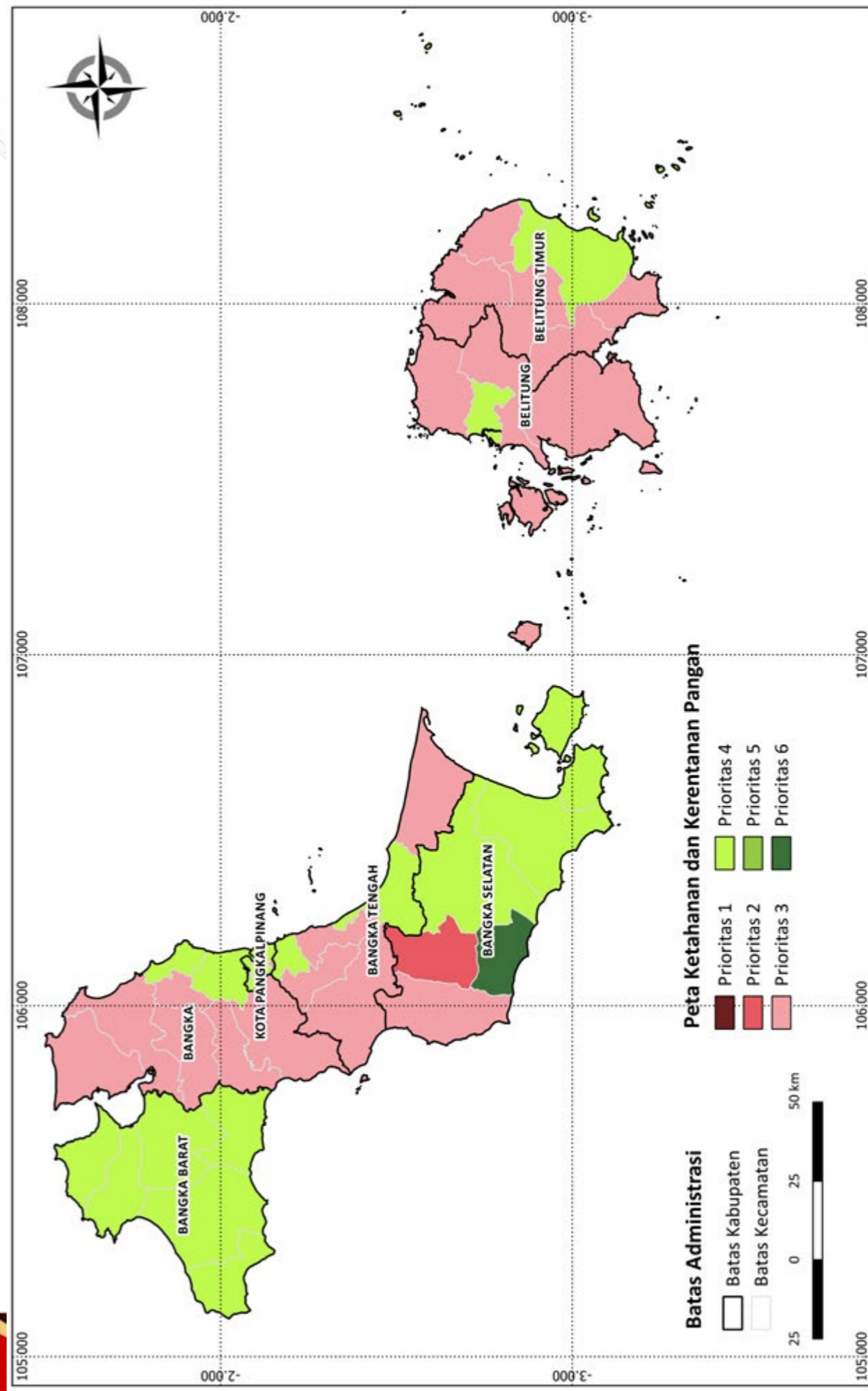
PROVINSI SUMATERA SELATAN



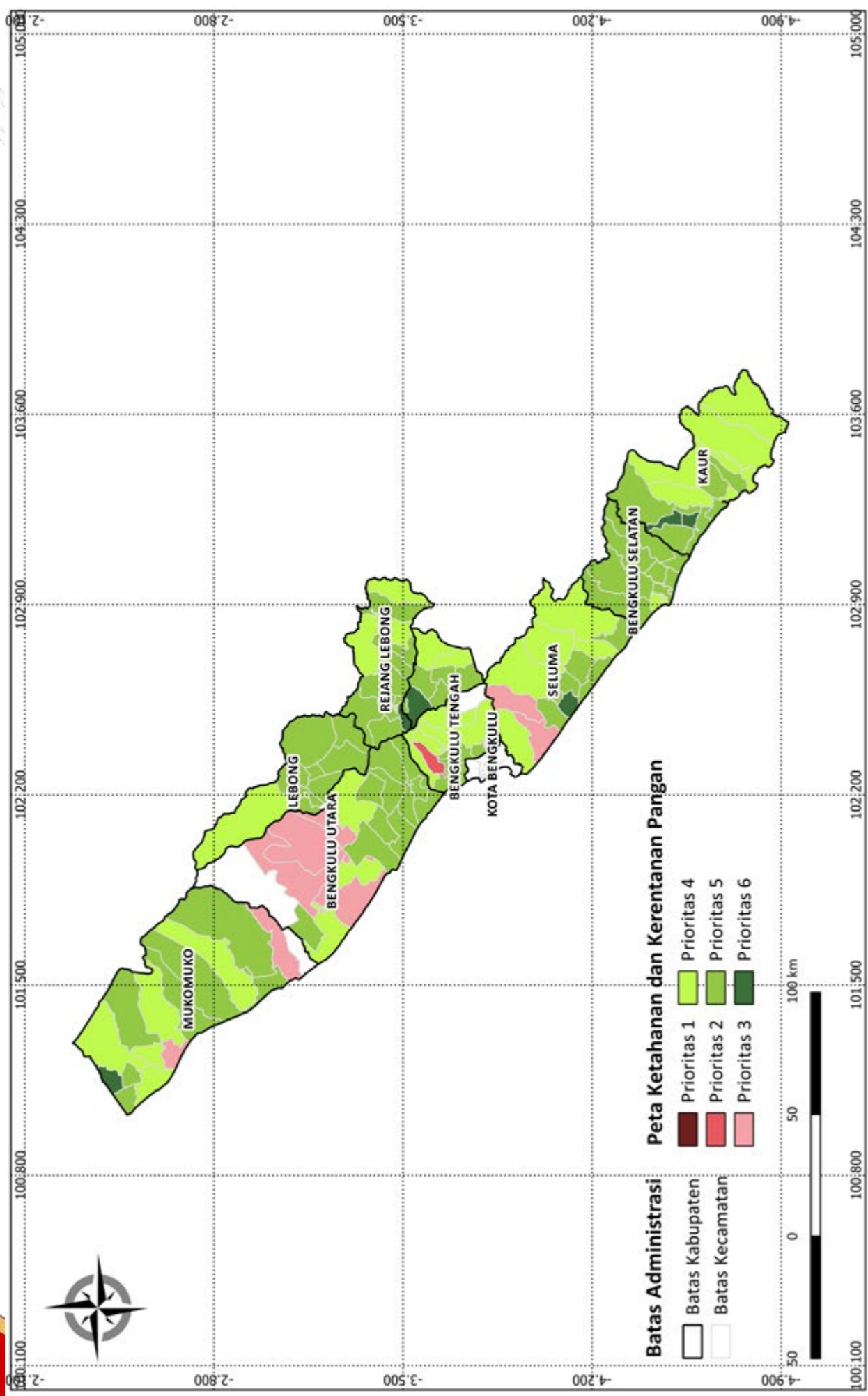
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



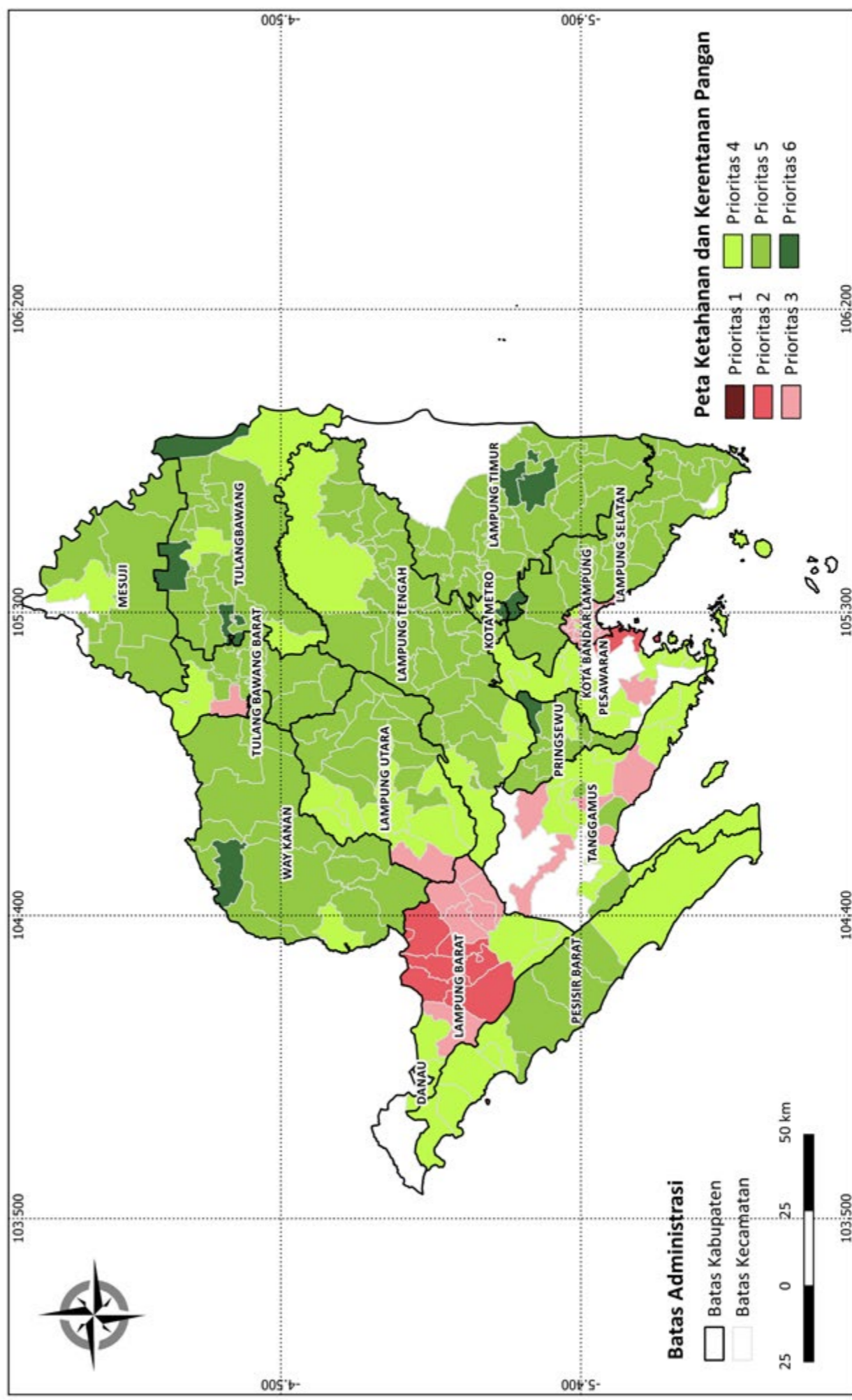
PROVINSI BANGKA BELITUNG



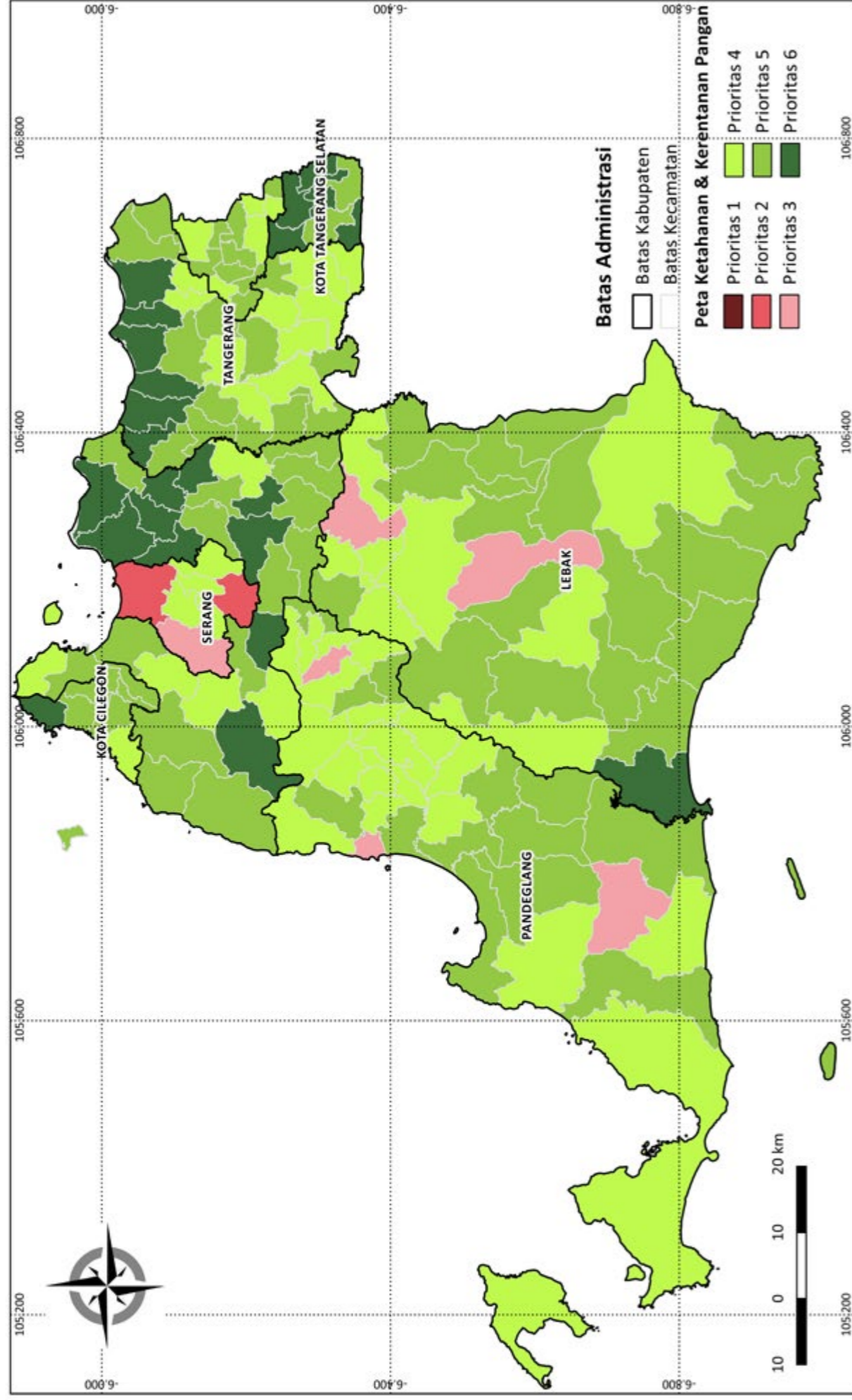
PROVINSI BENGKULU



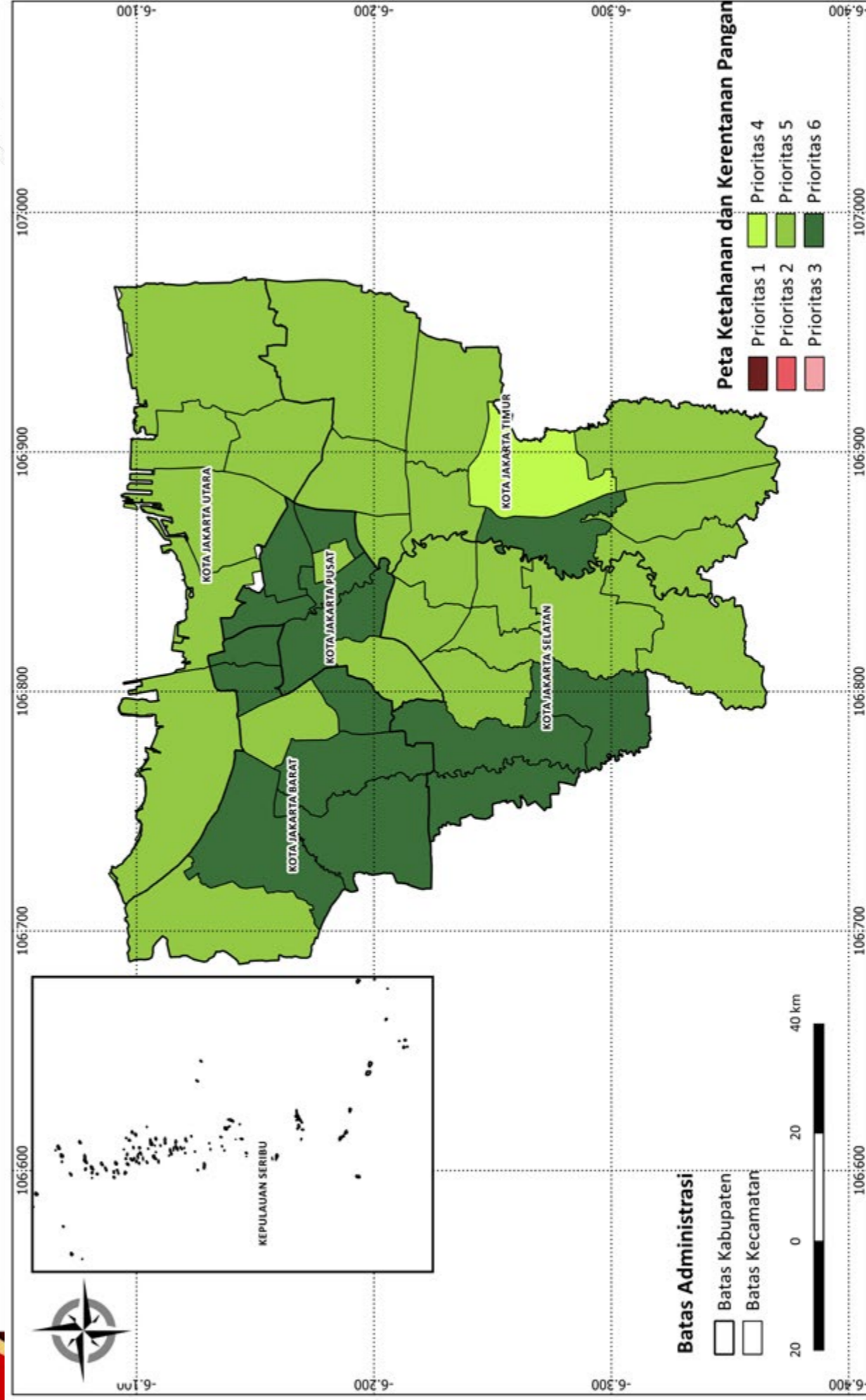
PROVINSI LAMPUNG



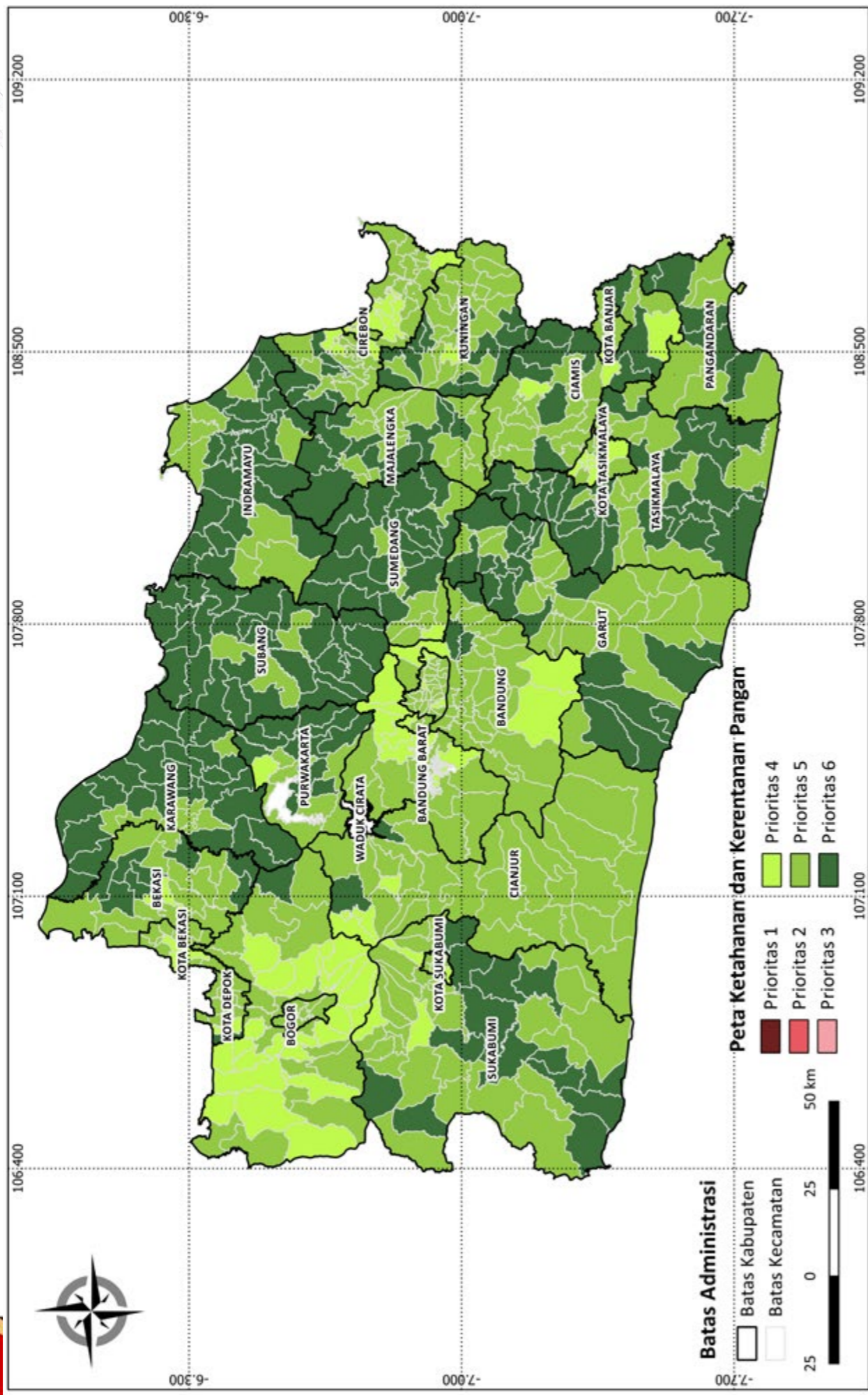
PROVINSI BANTEN



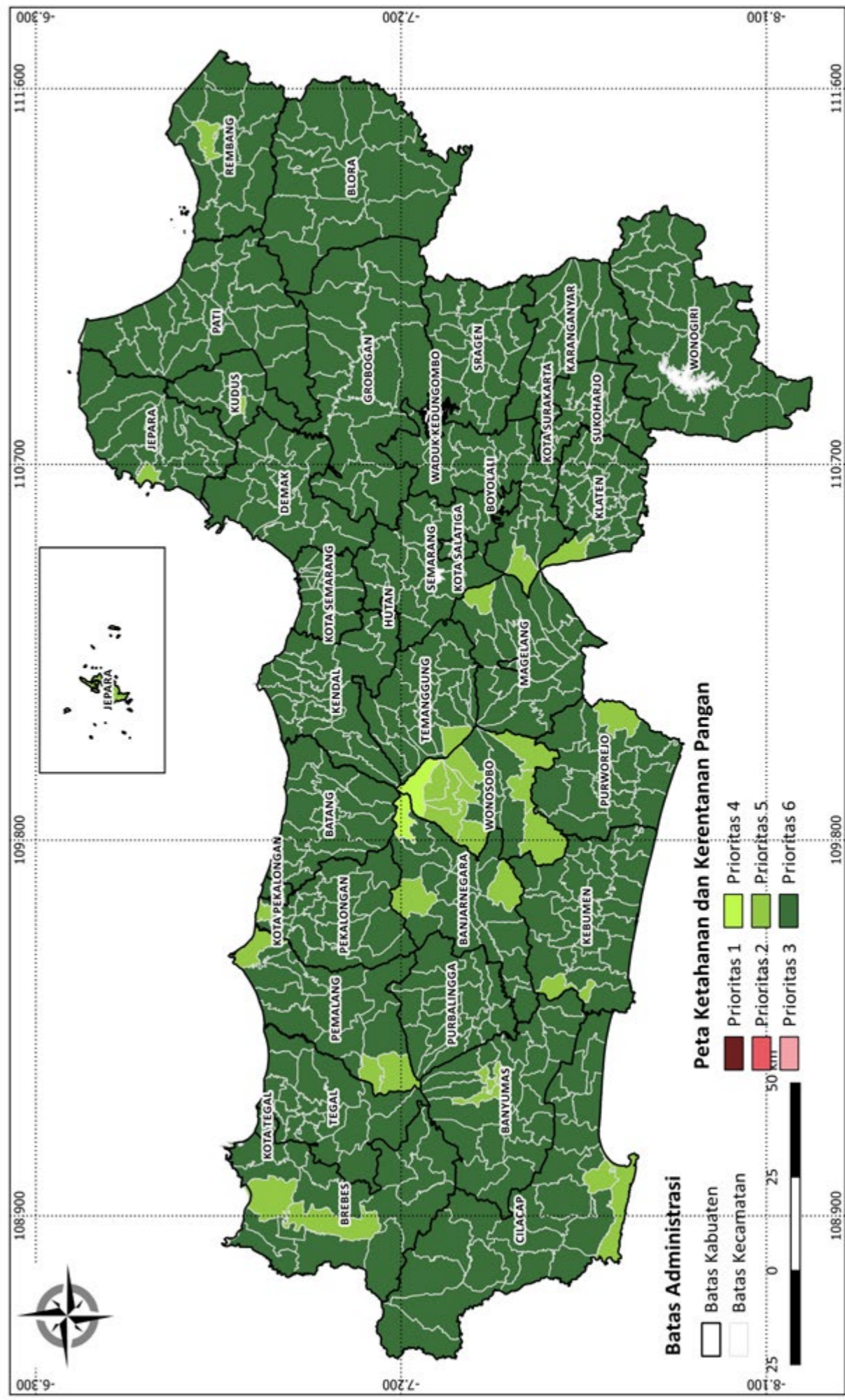
PROVINSI DKI JAKARTA



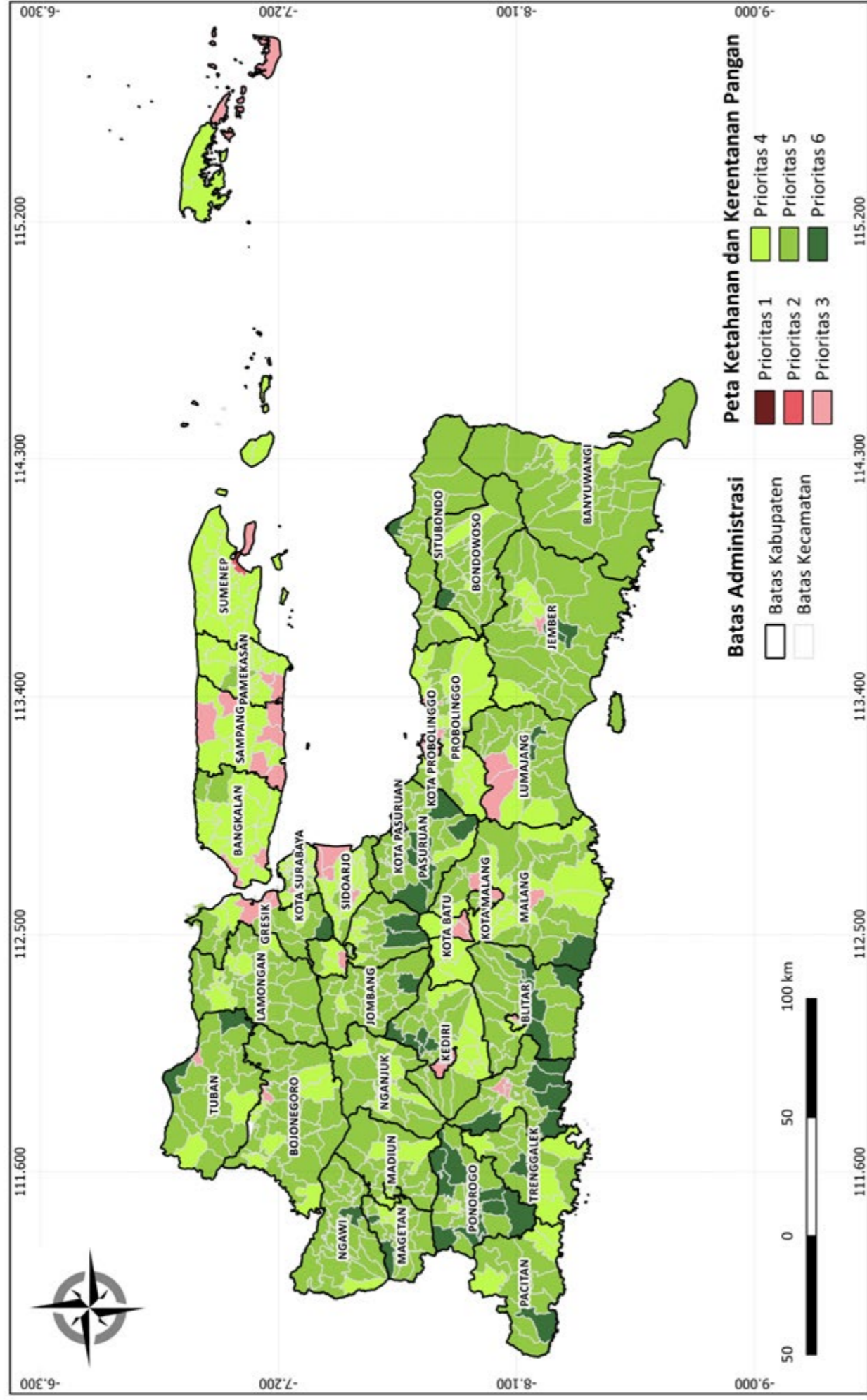
PROVINSI JAWA BARAT



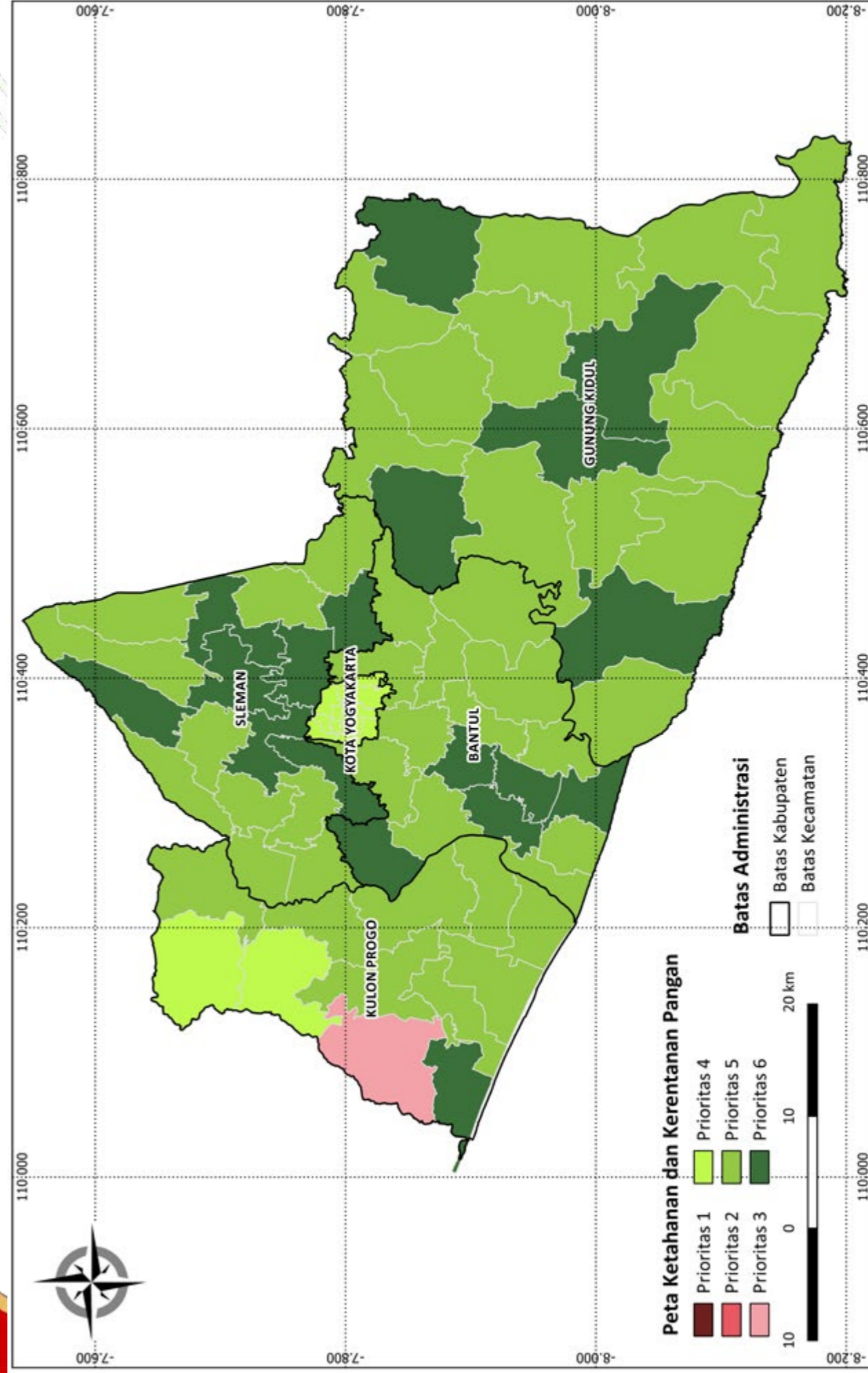
PROVINSI JAWA TENGAH

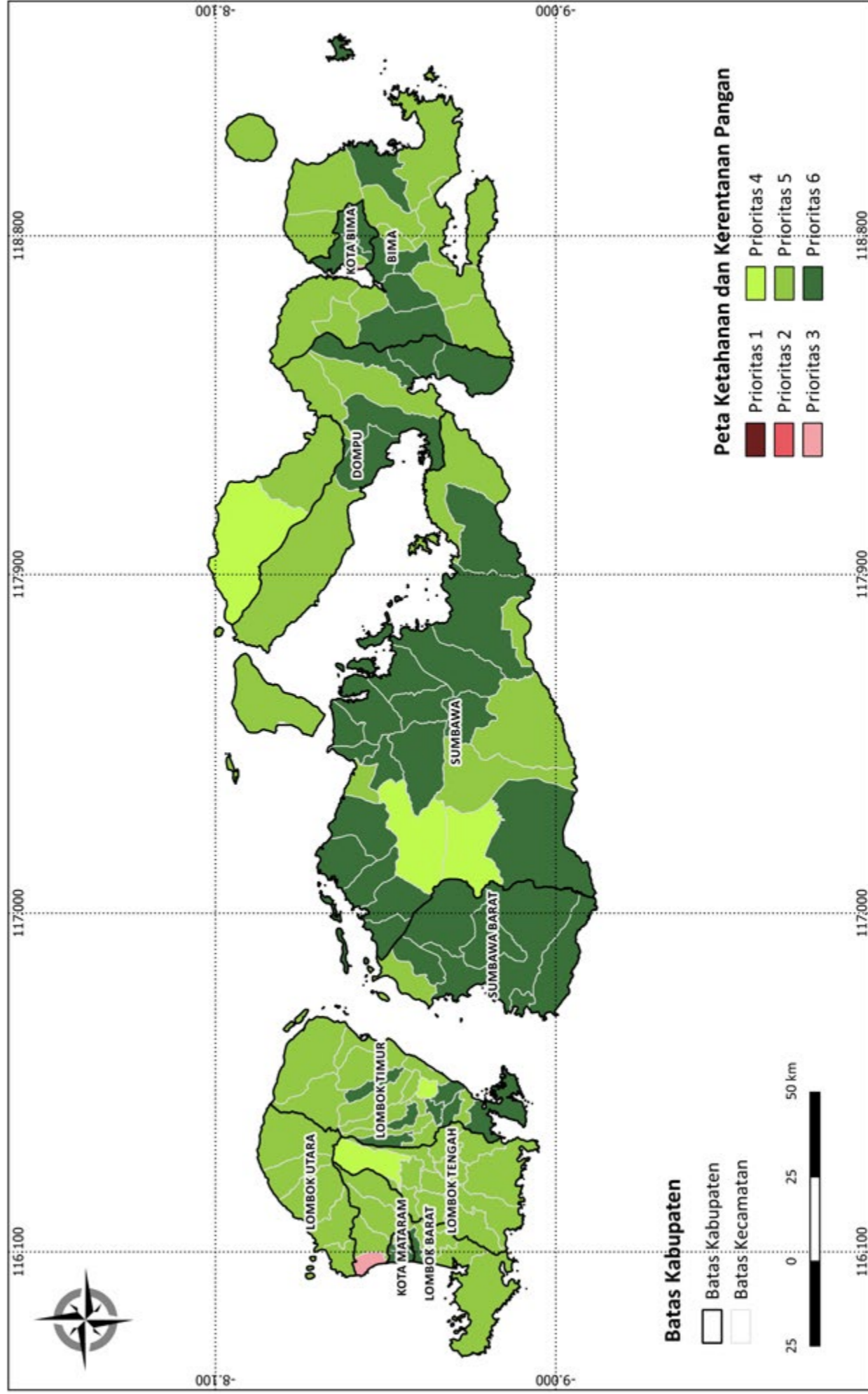
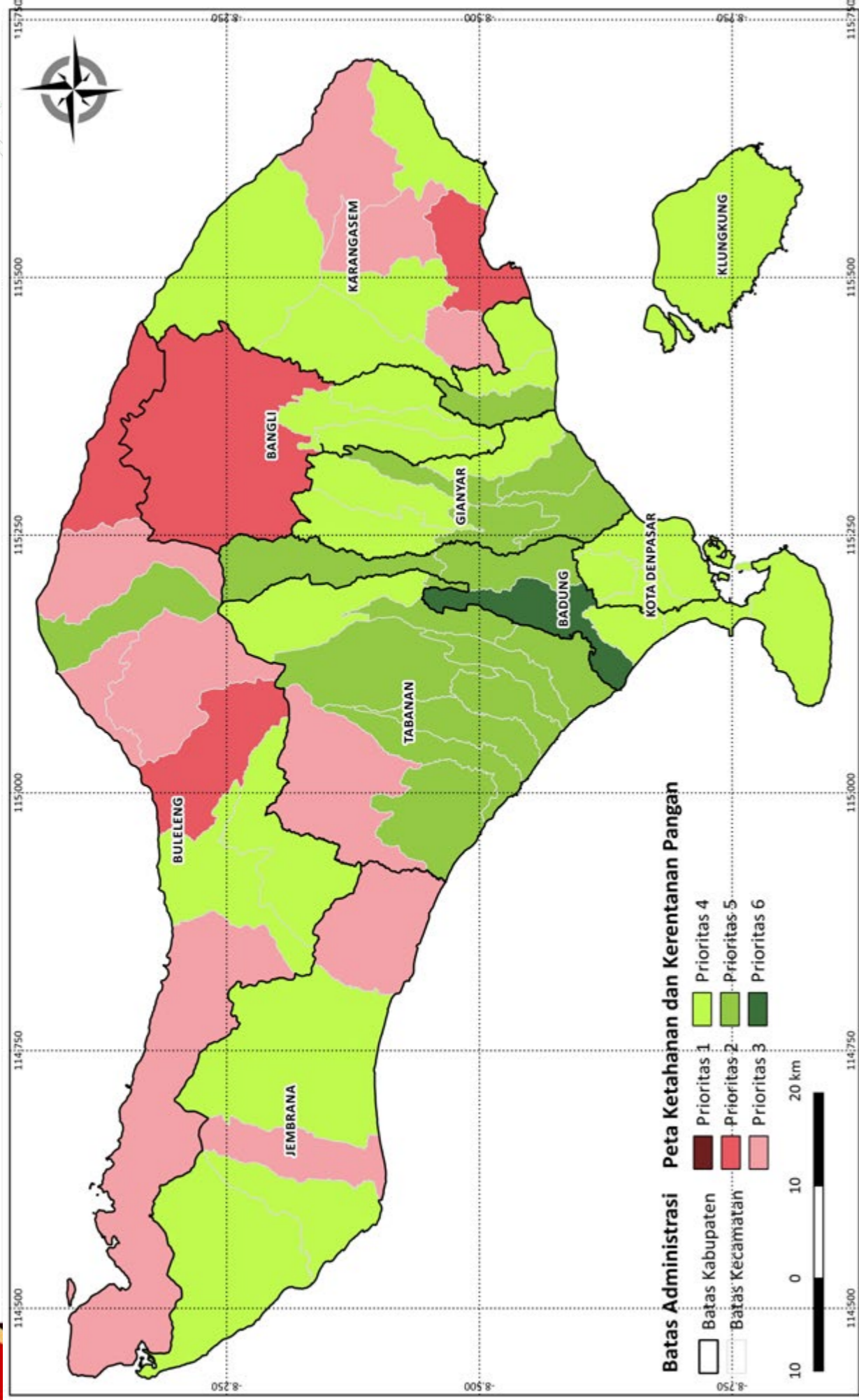


PROVINSI JAWA TIMUR

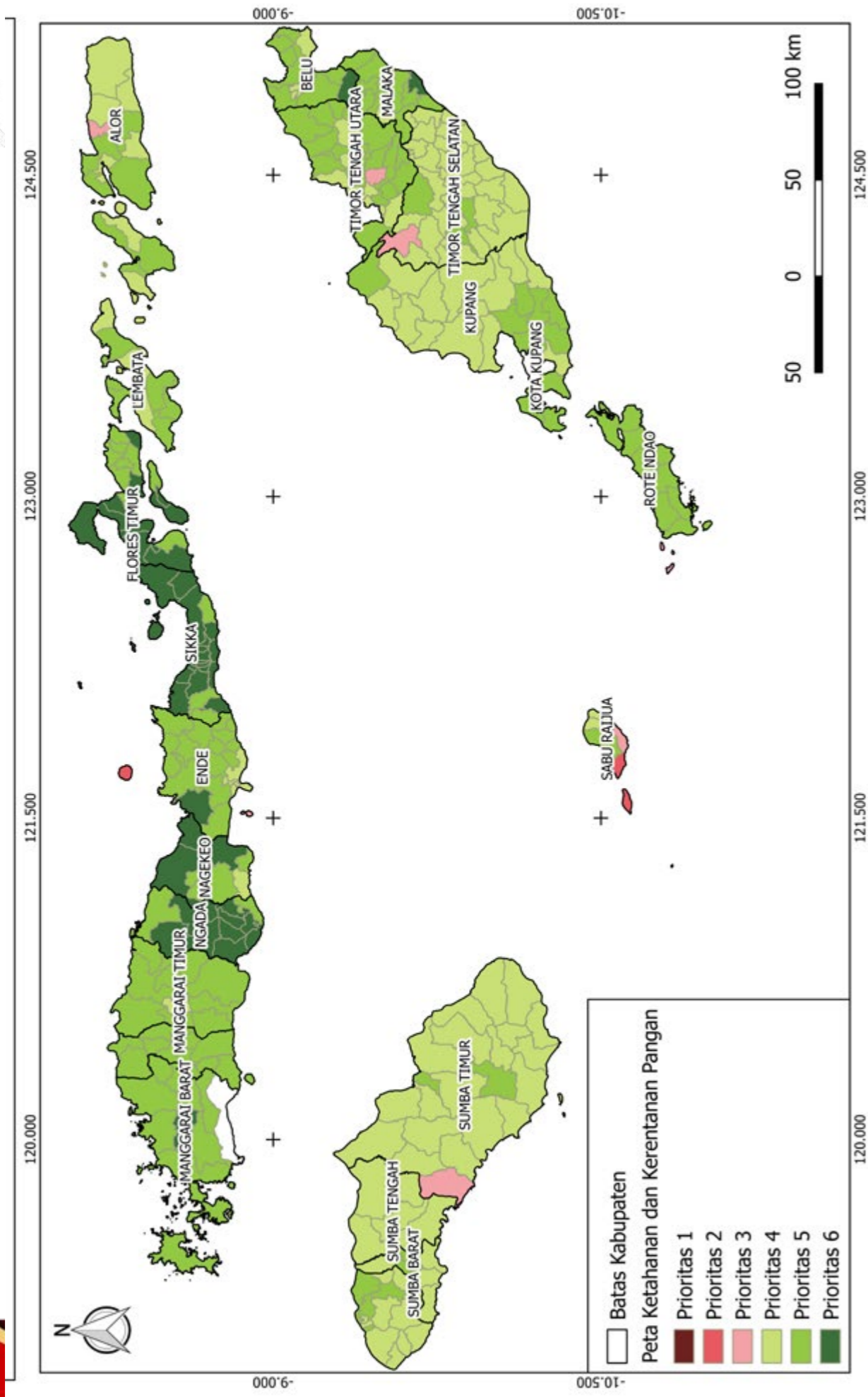


PROVINSI YOGYAKARTA

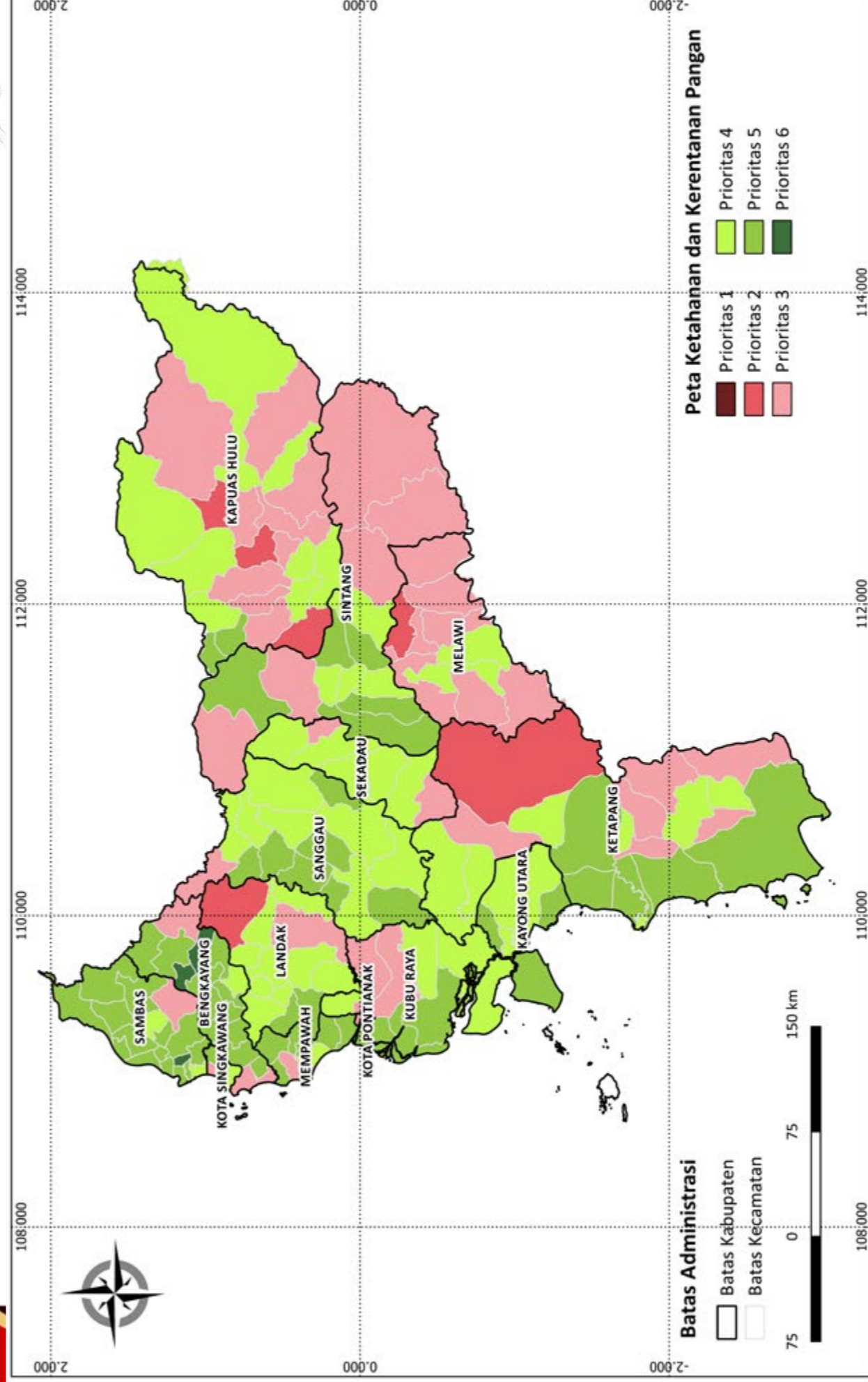




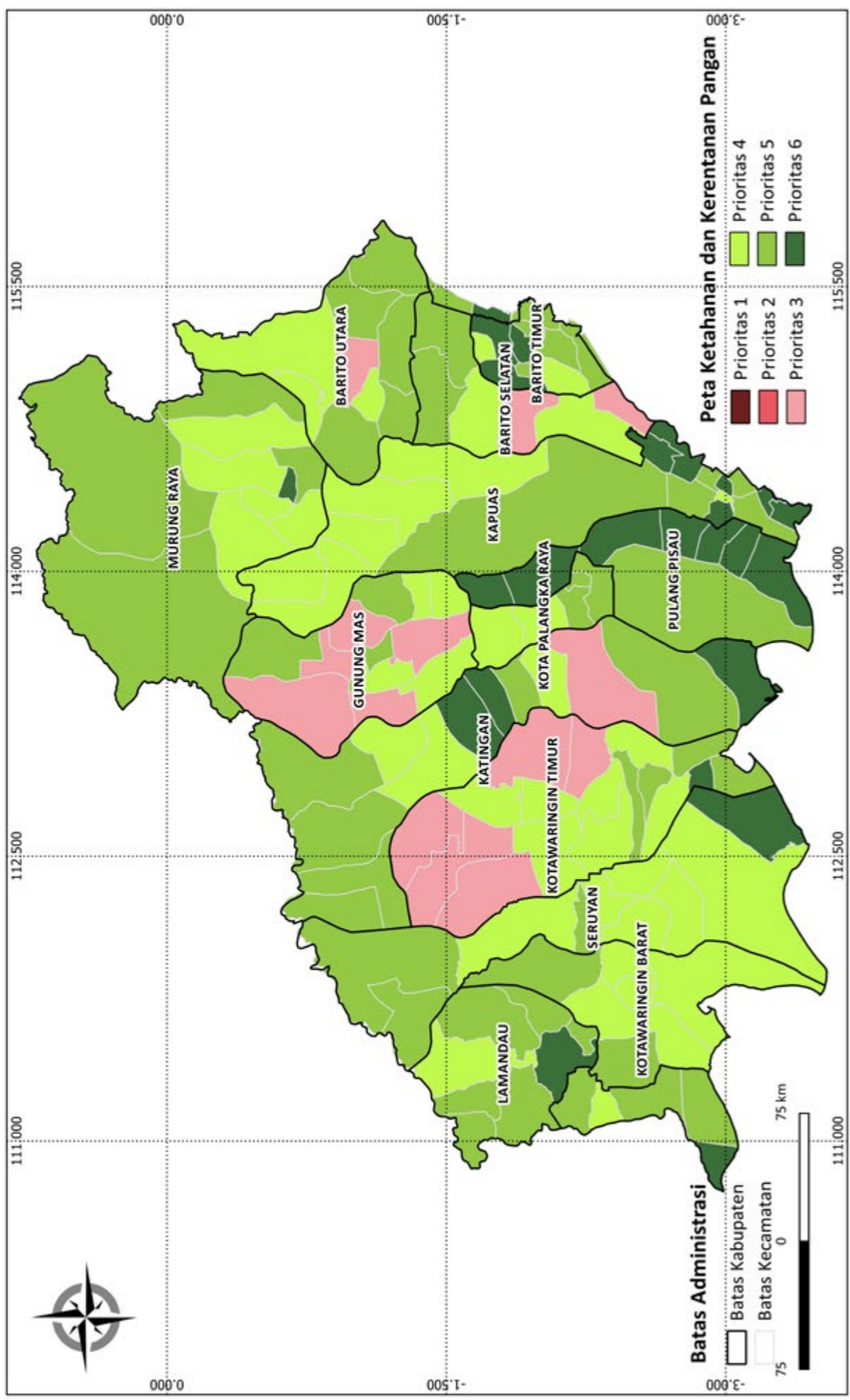
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



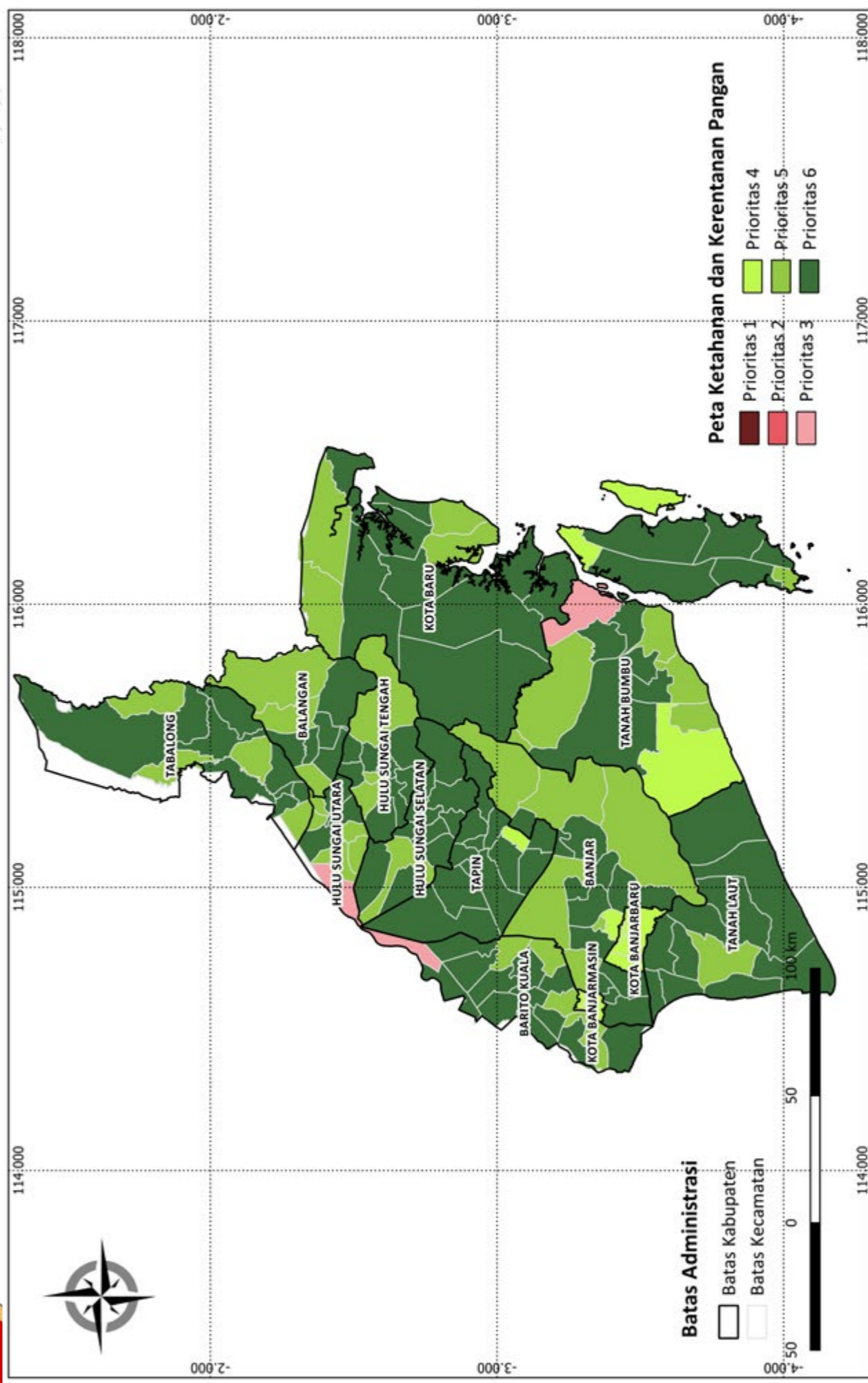
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



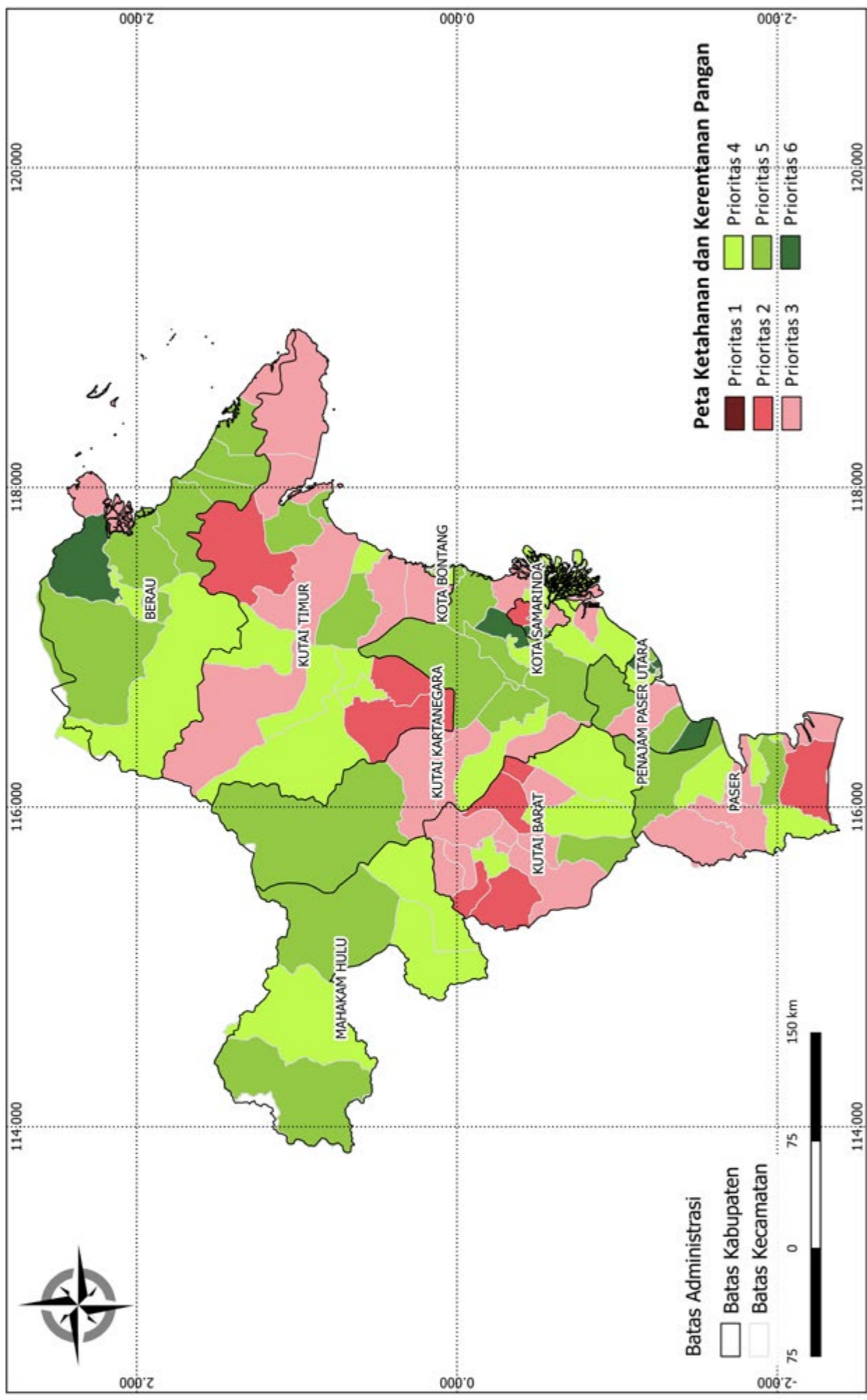
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



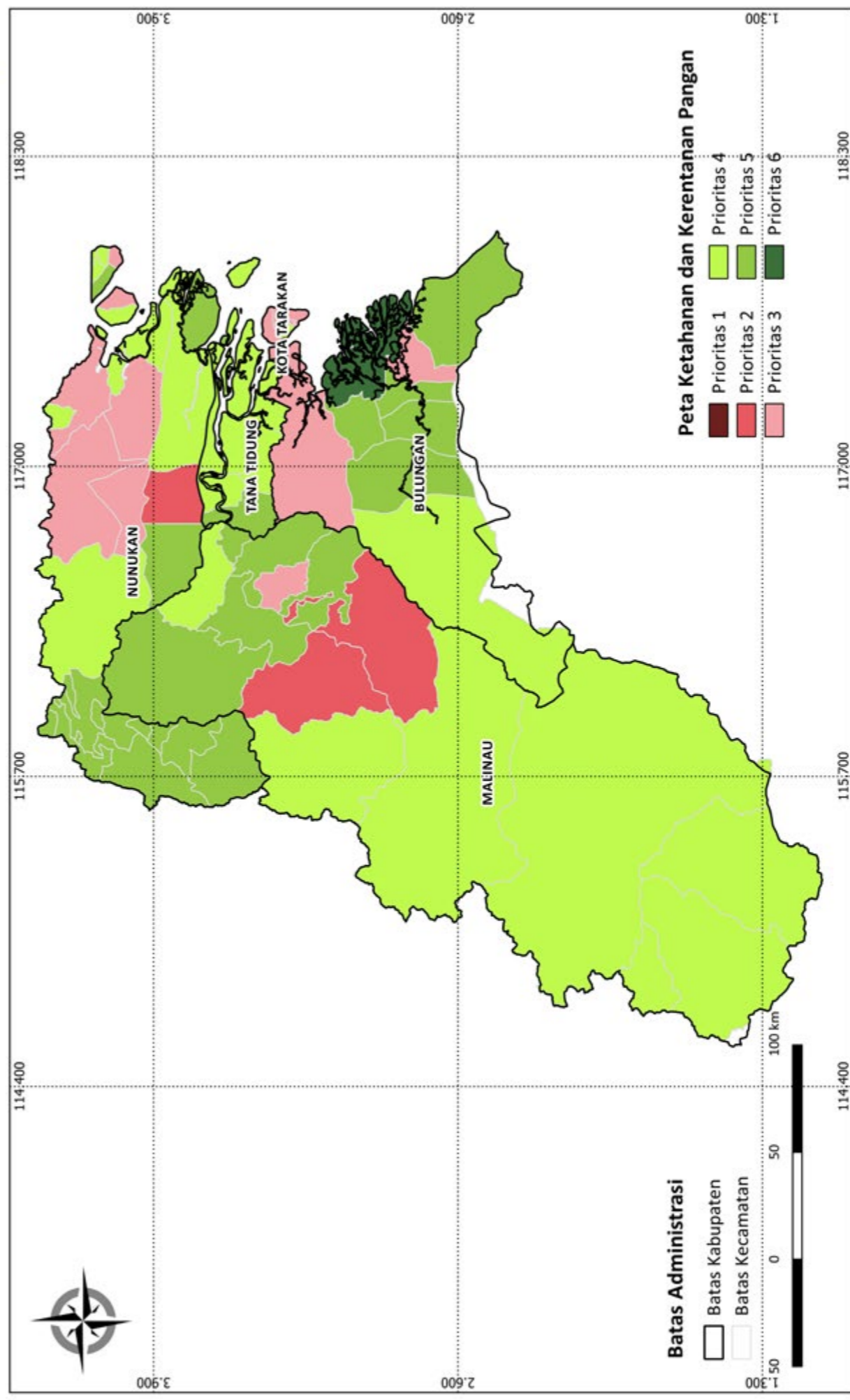
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



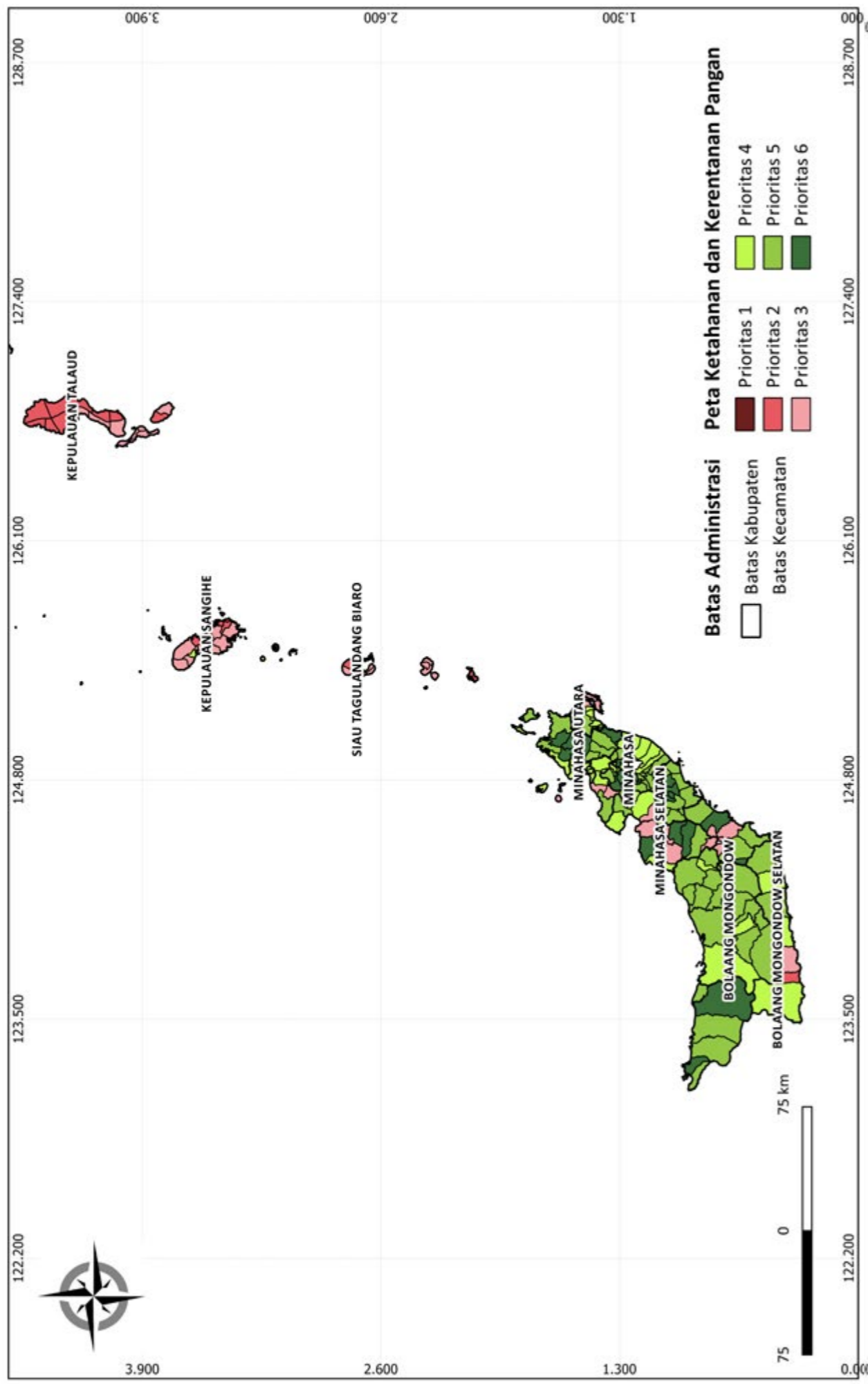
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



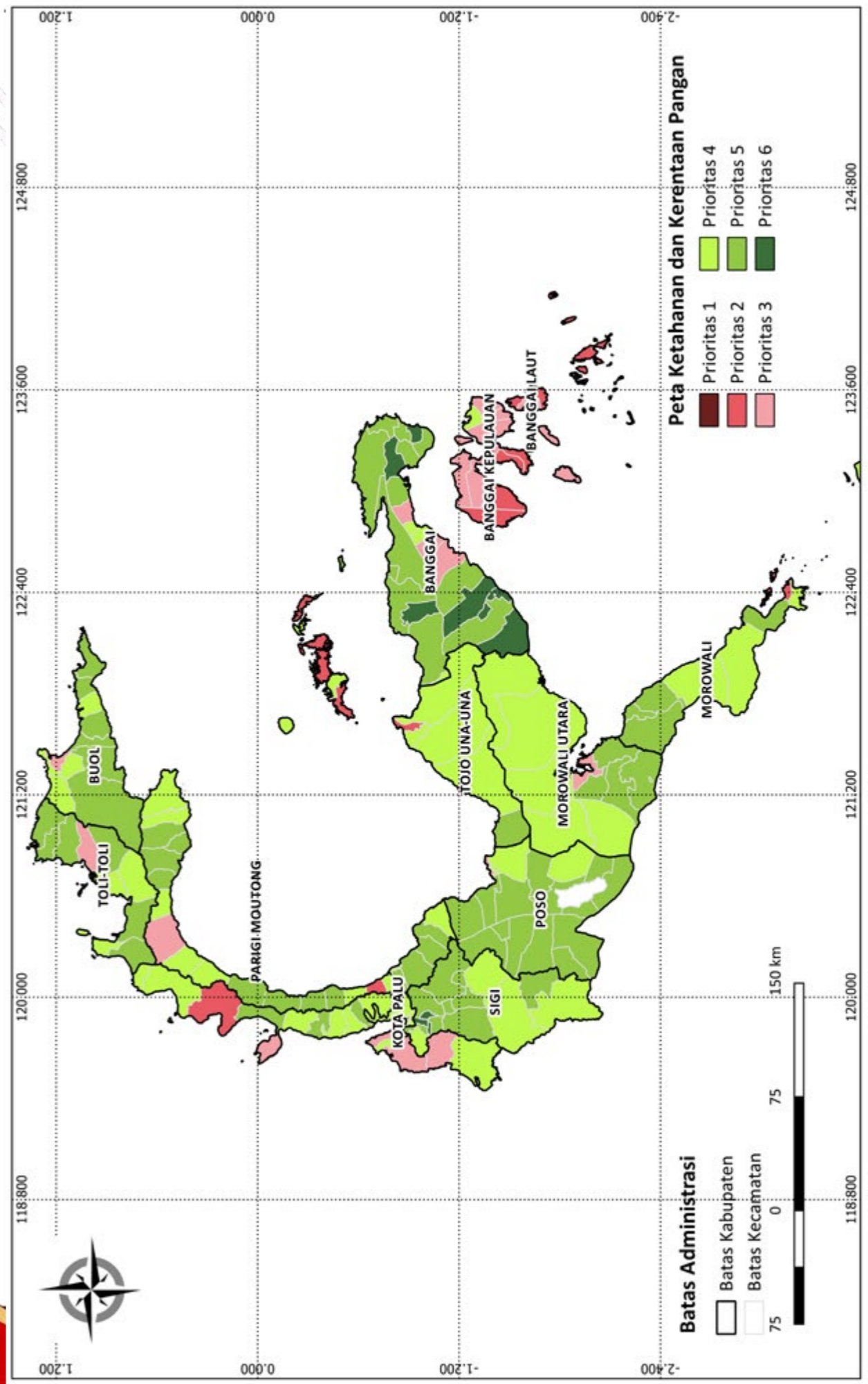
PROVINSI KALIMANTAN UTARA



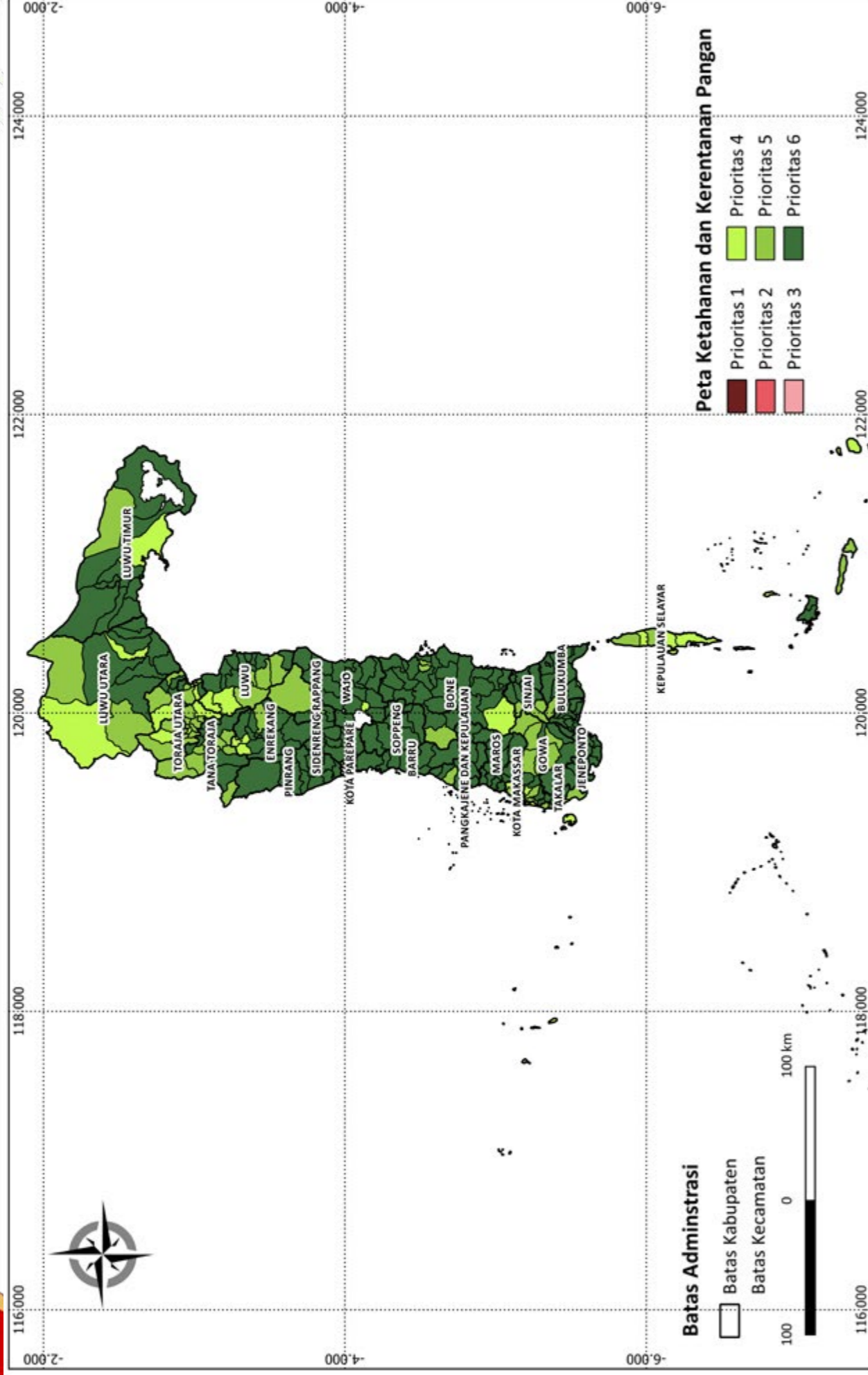
PROVINSI SULAWESI UTARA



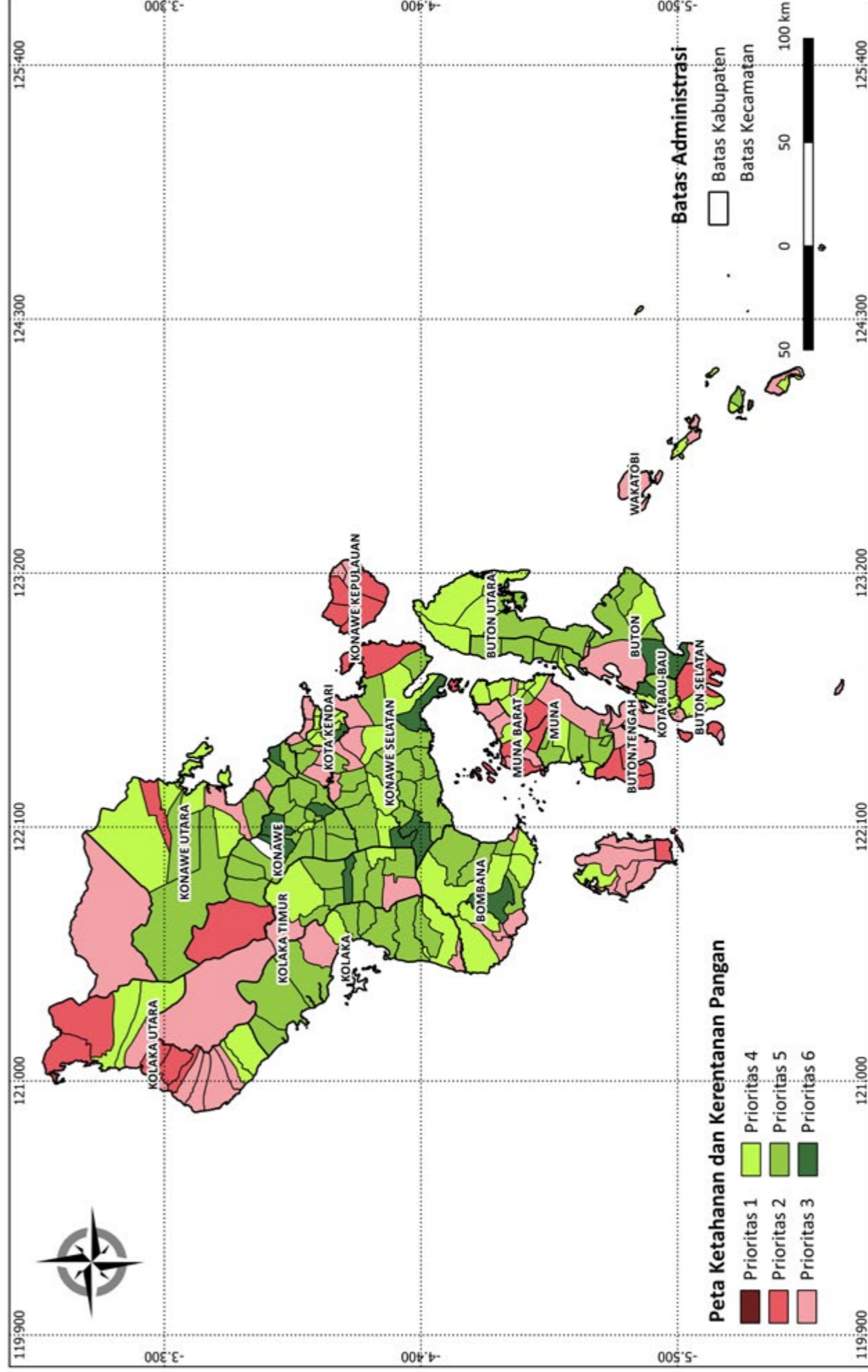
PROVINSI SULAWESI TENGAH



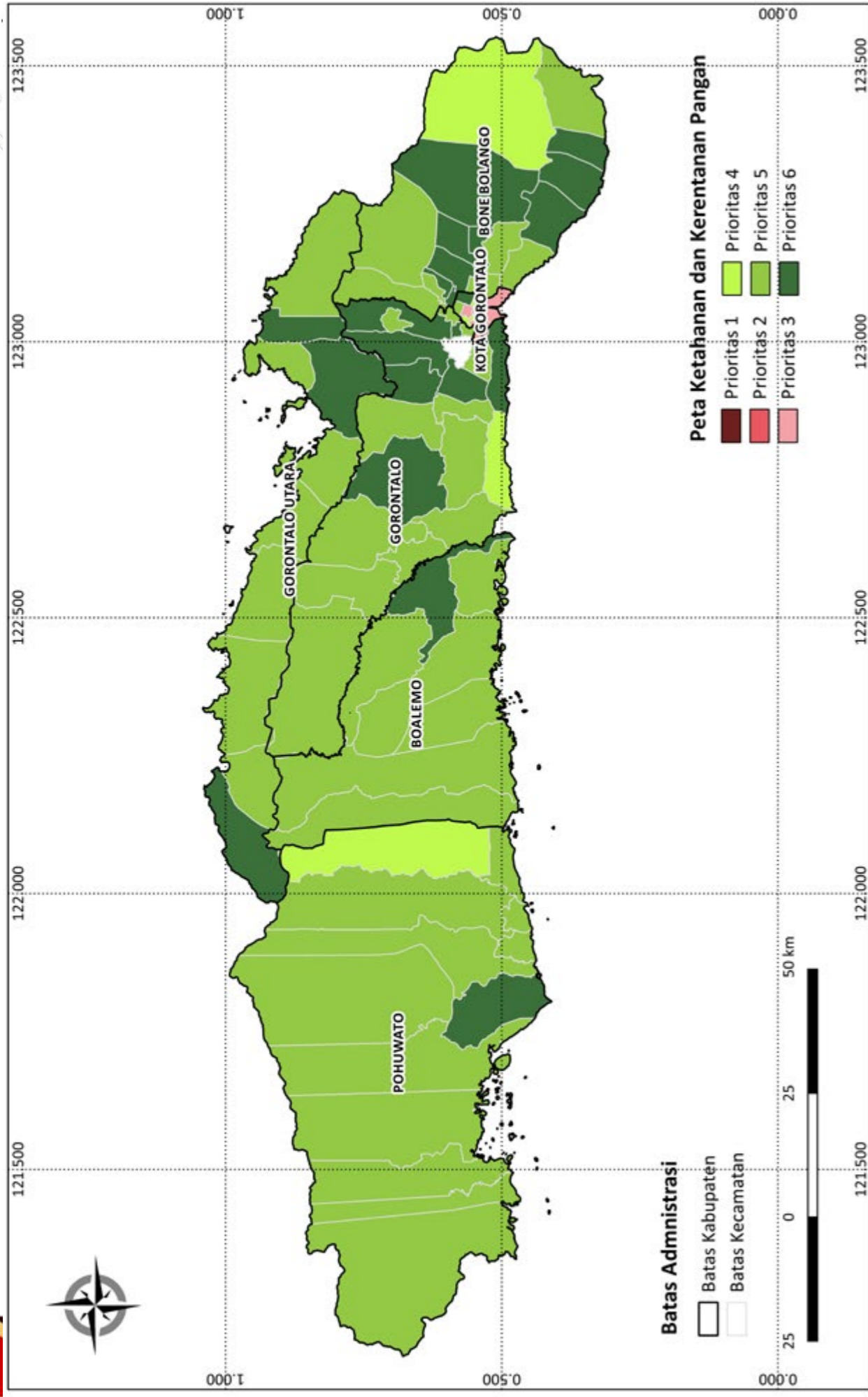
PROVINSI SULAWESI SELATAN



PROVINSI SULAWESI TENGGARA

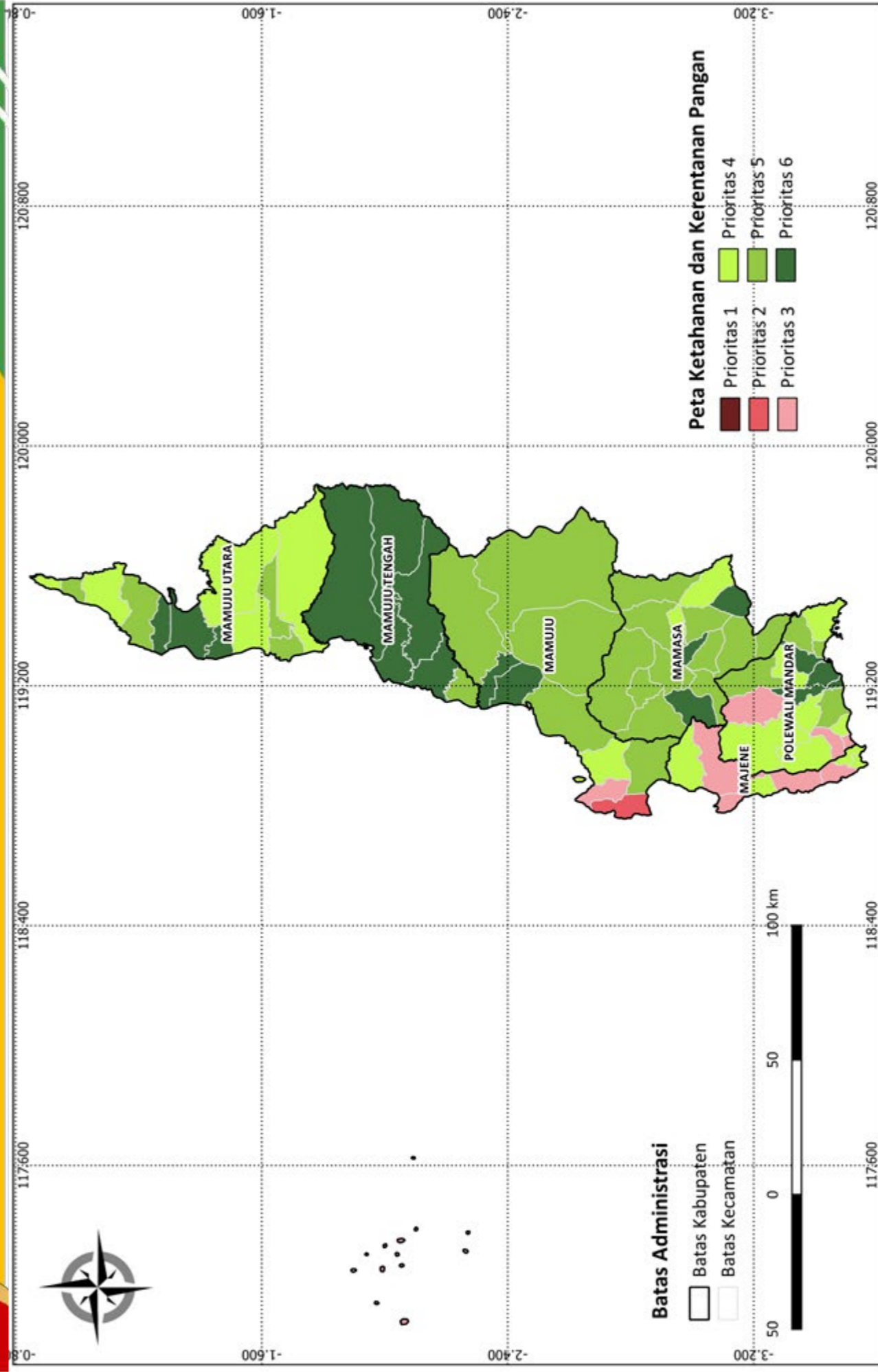


PROVINSI GORONTALO



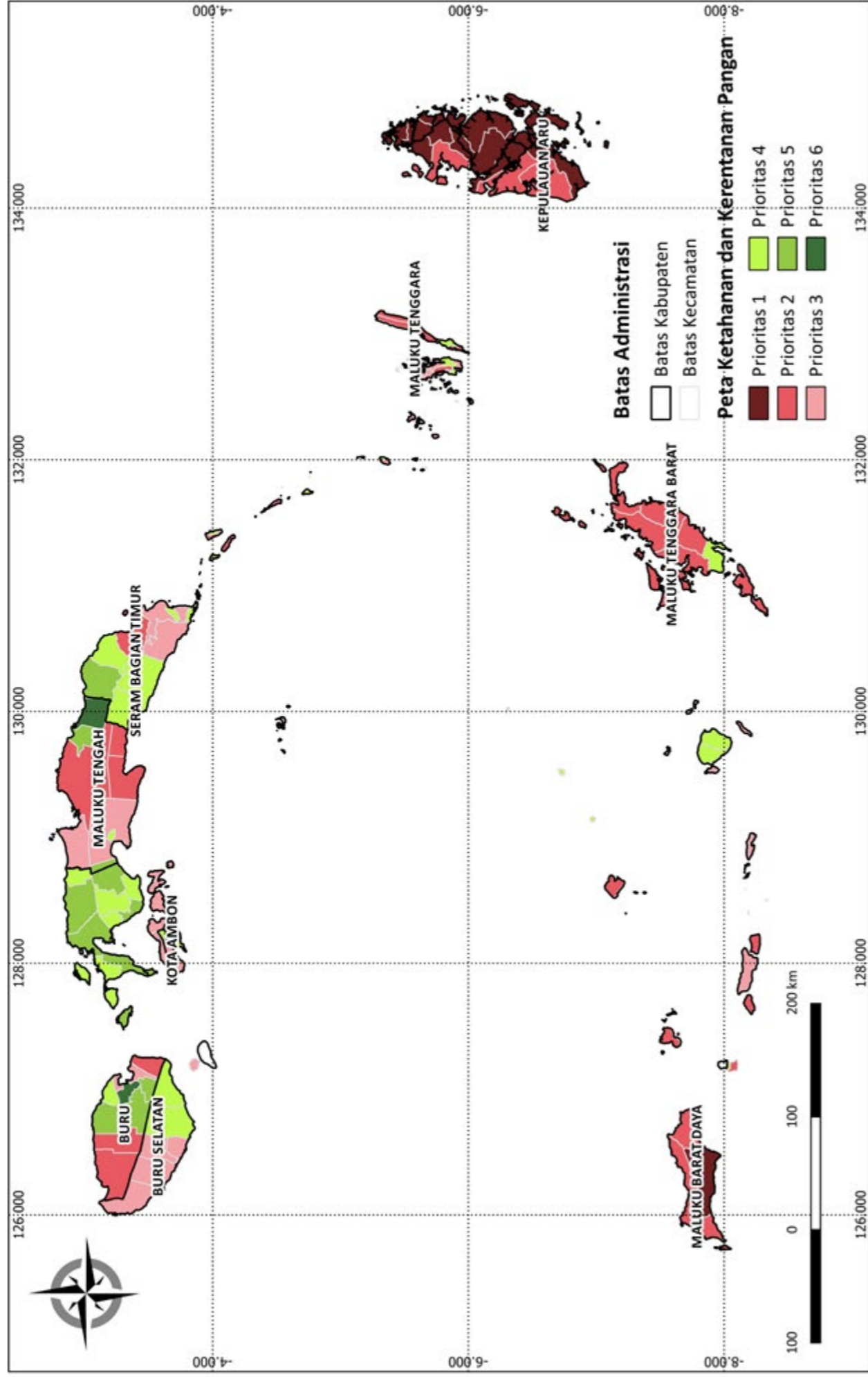
46

PROVINSI SULAWESI BARAT

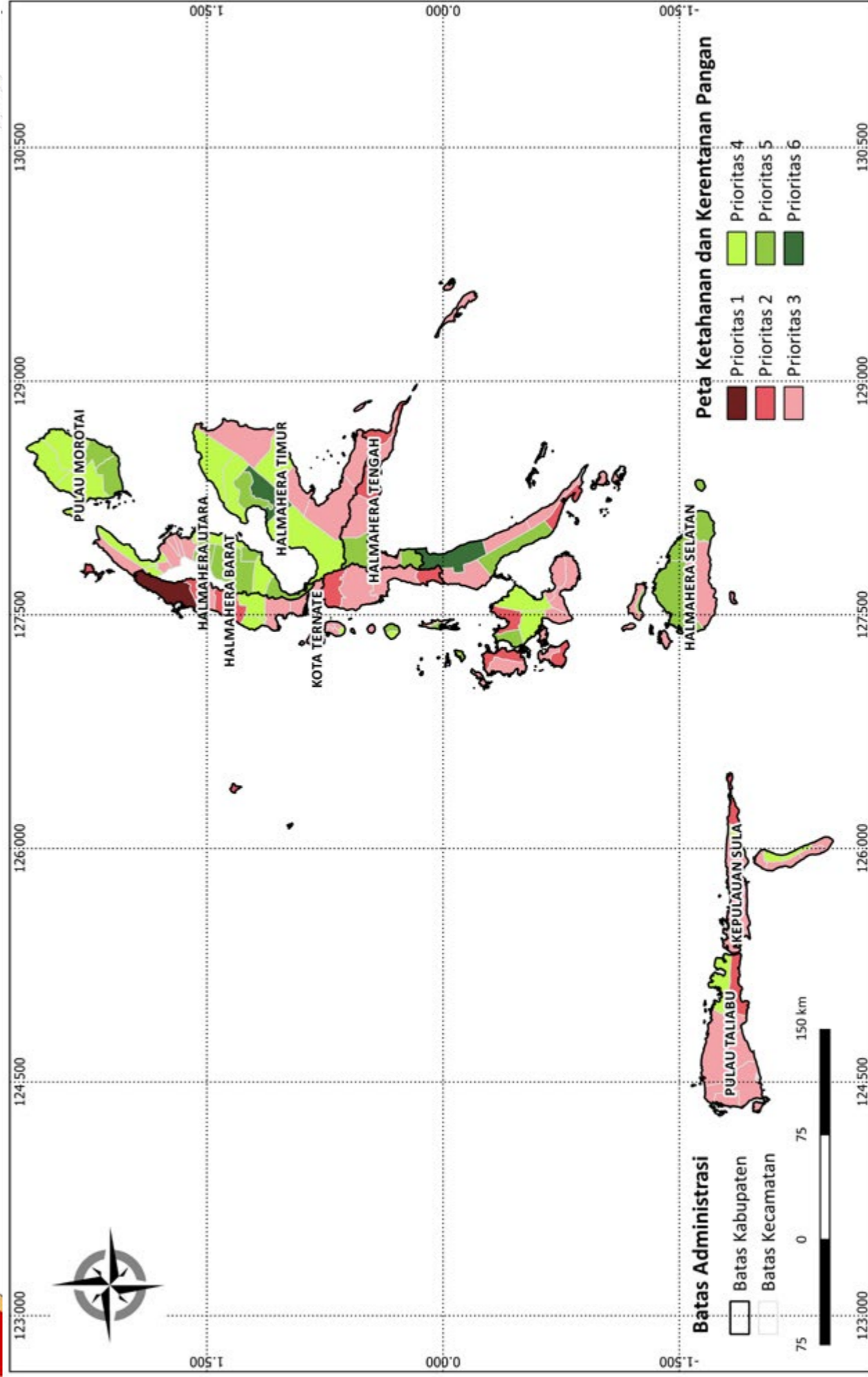


47

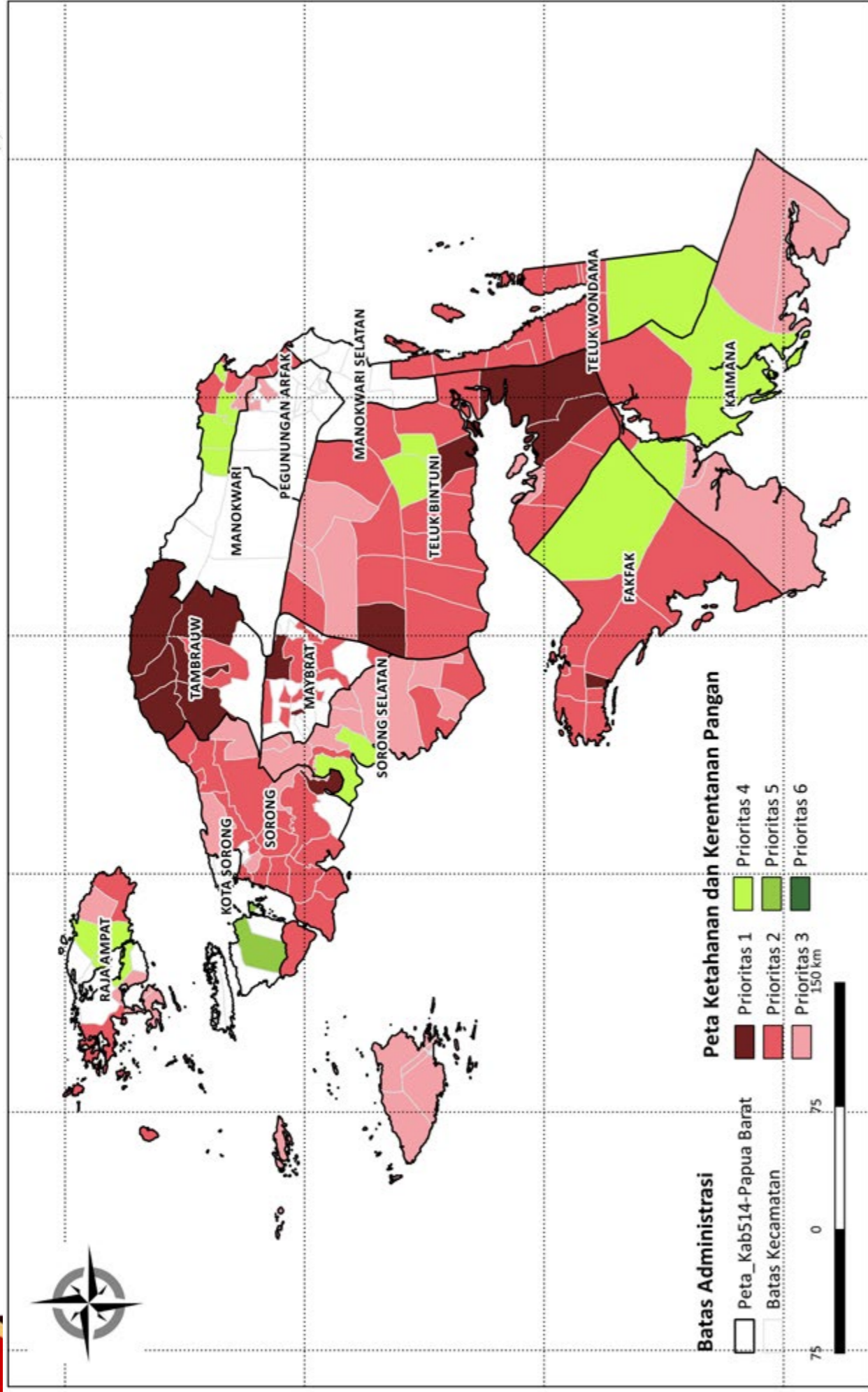
PROVINSI MALUKU



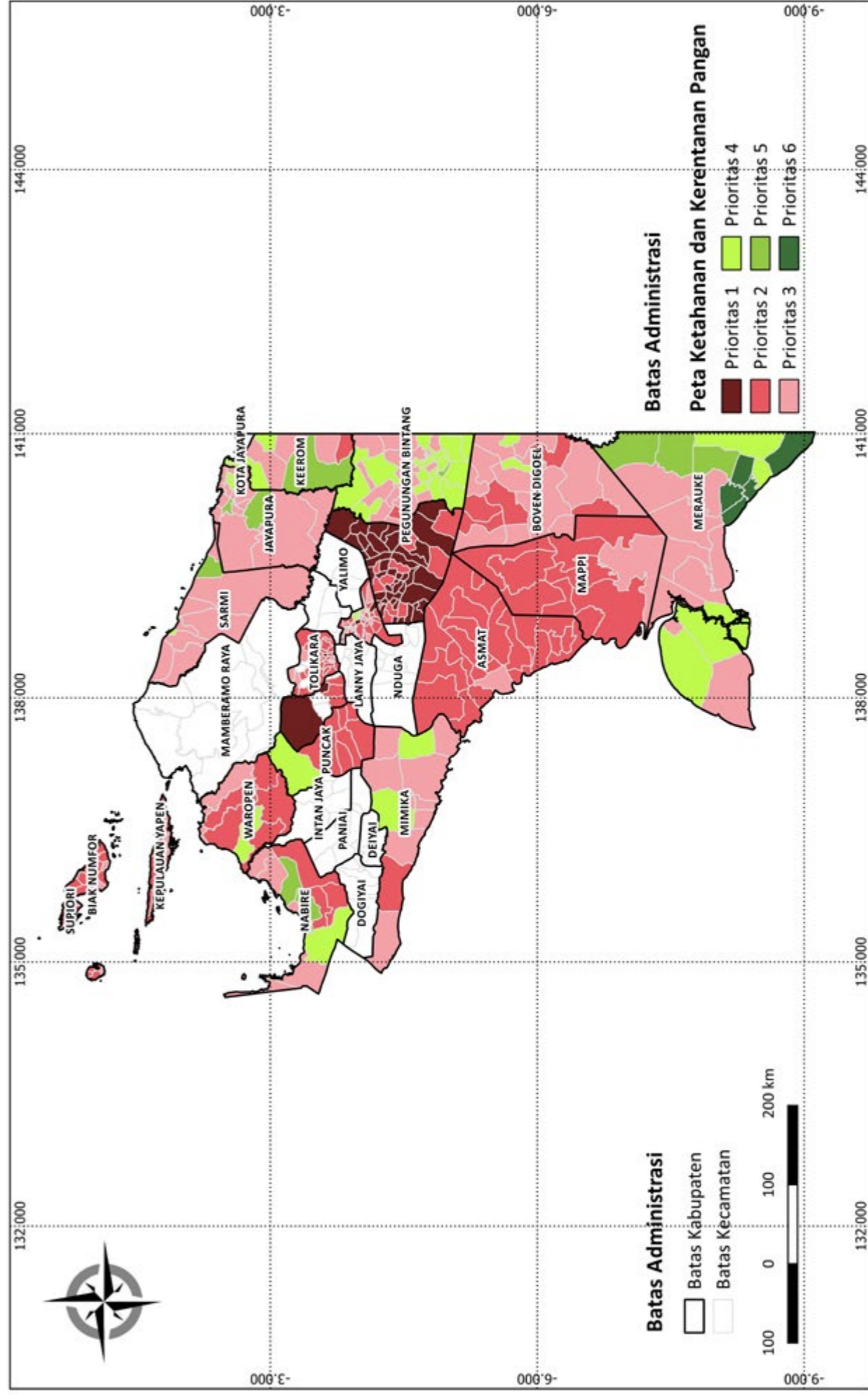
PROVINSI MALUKU UTARA



PROVINSI PAPUA



PROVINSI PAPUA BARAT





KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Harsono RM. No.3, Ragunan-Jakarta 12550, Indonesia
Telp: 021-7806131, 021-7804116, Fax: 021-7806305
<http://www.pertanian.go.id>



@kementanRI



@kementerianpertanian



@kementan



Kementerian Pertanian RI